

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN
DESA DI DESA KESUMBO AMPAI KECAMATAN
BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Oleh :

Fitriani
157110664

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PEKANBARU
2020**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis**”. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kekurangan, baik dari segi tata bahasa, teknik penulisan, segi bentuk ilmiahnya, dan lain sebagainya. Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang memungkinkan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, rasa terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Safrinaldi, SH. M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada penulsi dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan ini.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Ibu Lilis Suryani, S.Sos, M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Admnistrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Hendry Andry, S.Sos. M.Si. selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan, motivasi, nasehat, dan pengarahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak-Ibu Kepala Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dengan data-data dan solusi yang penulis butuhkan.
7. Ayahanda terkasih Bonyadi (Alm) dan Ibunda tersayang Sumarsih atas curahan kasih sayang, untaian doa, serta motivasi tiada henti dan sangat besar yang tak ternilai harganya bagi penulis dan hanya Allah SWT lah yang mampu membalasnya.
8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015; terima kasih atas semuanya. Hari-hari perkuliahan bersama kalian susah untuk dilupakan dan kupastikan kalian menjadi suatu kenangan yang terindah dalam hidup ini.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon semoga bimbingan, bantuan, pengorbanan dan keikhlasan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan yang layak dari Allah SWT, Amin Yarabbal Alamin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 05 Agustus 2020
Penulis,

Fitriani

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
1. Tujuan Penelitian.....	12
2. Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	13
1. Konsep Administrasi.....	13
2. Konsep Organisasi.....	16
3. Konsep Manajemen.....	19
4. Konsep Peran.....	21
5. Konsep Pemerintah Desa	27
6. Konsep Badan Permusyawaratan Desa	32
7. Konsep Pembangunan Desa	37
B. Kerangka Pikir.....	38
C. Konsep Operasional	39
D. Operasional Variabel.....	42
E. Teknik Pengukuran	43
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	46
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Populasi dan Sampel.....	46
D. Teknik Penarikan Sampel.....	47
E. Jenis dan Sumber Data.....	48
F. Teknik Pengumpulan Data.....	49
G. Teknik Analisis Data.....	50

H. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	51
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis.....	52
B. Gambaran Umum Kecamatan Mandau	54
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Responden.....	61
B. Hasil Penelitian Tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis	63
C. Hambatan Dalam Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis	79
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	85

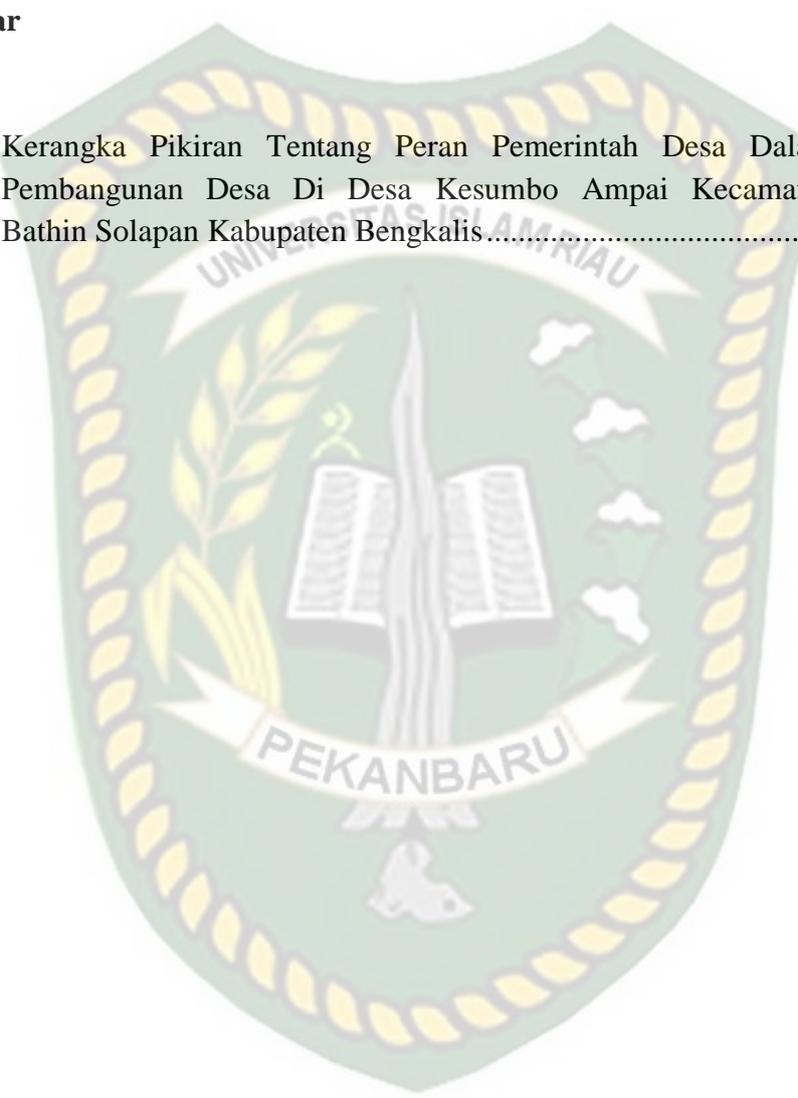
DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1. : Pembangunan yang sudah dan belum dilaksanakan tahun 2018 – 2019 di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis	10
II.1 : Operasonal Variabel Tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.....	46
III.1 : Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.....	49
III.2 : Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.....	51
IV.1 : Luas Wilayah Kecamatan Mandau menurut Desa/Kelurahan	55
IV.2 : Kecamatan Menurut Desa/Kelurahan	57
V.1 : Jumlah Keseluruhan Responden Berdasarkan Umur.....	61
V.2 : Jumlah Keseluruhan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	62
V.3. : Distribusi penilaian responden dari unsur Anggota BPD, Kepala Dusun, Ketua RT dan Ketua RW terhadap indikator penyampai pesan pembangunan dalam peran pemerintah desa dalam pembangunan desa di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis	66
V.4. : Distribusi penilaian responden dari unsur Tokoh Masyarakat terhadap indikator penyampai pesan pembangunan dalam peran pemerintah desa dalam pembangunan desa di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis	68

- V.5. : Distribusi penilaian responden dari unsur Anggota BPD, Kepala Dusun, Ketua RT dan Ketua RW terhadap indikator pengaruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam peran pemerintah desa dalam pembangunan desa di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis..... 71
- V.6. : Distribusi penilaian responden dari unsur tokoh masyarakat terhadap indikator pengaruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam peran pemerintah desa dalam pembangunan desa di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis..... 73
- V.8. : Distribusi penilaian responden dari unsur Anggota BPD, Kepala Dusun, Ketua RT dan Ketua RW terhadap indikator penyalur aspirasi masyarakat dalam peran pemerintah desa dalam pembangunan desa di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis..... 75
- V.9. : Distribusi penilaian responden dari unsur tokoh masyarakat terhadap indikator penyalur aspirasi masyarakat dalam peran pemerintah desa dalam pembangunan desa di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis 77

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 : Kerangka Pikiran Tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.....	44



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitriani
 NPM : 157110664
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa Di
 Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan
 Kabupaten Bengkalis

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian seminar skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara R 1 l.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Agustus 2020
 Pelaku Pernyataan,

Fitriani

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA
KESUMBO AMPAI KECAMATAN BATHIN SOLAPAN
KABUPATEN BENGKALIS**

ABSTRAK

Oleh

**Fitriani
157110664**

Kata Kunci : Peran, Pemerintah Desa, Pembangunan Desa

Kepala Desa berkewajiban untuk melakukan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa adalah sesuatu yang sangat penting. Karena dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Karena itu sudah menjadi kewajiban pemerintahan desa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Aspirasi masyarakat dapat tertampung dengan cara melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan tersebut. Kurang efektifnya peran pemerintah desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, hal ini terlihat dari adanya program pembangunan desa yang tidak sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan peran kepala desa di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dan hambatan-hambatannya. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan kuantitatif; Sampel sebanyak 37 orang yang terdiri dari Kepala Desa, BPD, Ketua RW, Ketua RT, dan tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data kuisisioner dan wawancara serta analisis data secara deskriptif dan kuantitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran pemerintah desa dalam pembangunan desa di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis sudah dapat dikatakan cukup berperan, dikarenakan dalam pelaksanaan tugas kepala desa ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan masih adanya beberapa pembangunan desa yang belum optimal dilakukan sehingga tidak dapat selesai dengan tepat waktu.

**THE ROLE OF THE VILLAGE GOVERNMENT IN VILLAGE
DEVELOPMENT IN KESUMBO AMPAI VILLAGE BATHIN
SOLAPAN SUB DISTRICT BENGKALIS
DISTRICT**

ABSTRACT

By

Fitriani

157110664

Keywords: Role, Village Government, Village Development

The Village Head is obliged to carry out village development. Village development planning is very important. Because it is from this development planning that the direction of village development is determined. Because it is the responsibility of the village government to accommodate the aspirations of the community in village development planning. Community aspirations can be accommodated by involving the Village Consultative Body in the development planning. The ineffective role of the village government in accommodating and channeling community aspirations can be seen from the existence of village development programs that are not in accordance with the aspirations and needs of the community. The purpose of this study is to determine and explain the role of the village head in Kesumbo Ampai Village, Bathin Solapan District, Bengkalis Regency and its obstacles. The methods used are descriptive and quantitative methods; The sample consisted of 37 people consisting of the Village Head, BPD, RW Chairman, RT Head, and community leaders. Data collection techniques were questionnaires and interviews, as well as descriptive and quantitative data analysis. This study concludes that the role of the village government in village development in Kesumbo Ampai Village, Bathin Solapan District, Bengkalis Regency has been quite instrumental, because in the implementation of the village head's duties it has not been completely going well, this is evidenced by the existence of several village developments. which has not been optimally done so that it cannot be finished on time.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam segi kehidupan manusia, administrasi sangat berhubungan dengan erat yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan kita sehari-hari. hal ini dalam menjalankan aktivitas kehidupan manusia memerlukan sebuah pelayanan administrative dari sebuah organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. oleh karena itu hal ini memerlukan manajemen agar tujuan organisasi tersebut dapat tercapai sebagai mana mestinya yaitu efektif dan efisien.

Pada organisasi tersebut masing-masing personil yang terlibat di dalamnya diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang dikoordinasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dimana tujuan organisasi tersebut dirumuskan secara musyawarah, sebagai tujuan bersama yang diwujudkan secara bersama-sama. Pentingnya organisasi sebagai alat administrasi dan manajemen dalam industri atau dunia kerja lainnya terlihat apabila bergerak tidaknya suatu organisasi ke arah pencapaian tujuan sangat tergantung pada kemampuan manusia dalam menggerakkan organisasi itu ke arah tujuan yang telah ditentukan.

Pendapat Siagian (2003;5) manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dengan demikian, dapat

dikatakan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi karena memang manajemen merupakan alat pelaksana utama administrasi.

Tujuan Negara Republik Indonesia (NKRI) terdapat pada Undang-undang dasar alinea keempat yaitu “ kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dari rumusan tersebut tersirat adanya tujuan Nasional atau Negara yang ingin dicapai sekaligus merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh Negara, yaitu : Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban duniadan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan negara tersebut dibentuklah pemerintahan dimana menurut Ndraha (2005:36) pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, sedangkan yang disebut dengan pemerintah adalah proses pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, pemerintahan dan organisasi yang memiliki tugas untuk memenuhi dan melindungi kepentingan bangsa Indonesia dibentuk dengan cara berpartisipasi yang mana dimulai dari pemerintahan daerah, pemerintahan kecamatan, kelurahan dan kampung. Pemerintah adalah lembaga yang memiliki kekuasaan untuk memerintah,

pemerintah ini memiliki power yang lebih dari yang diperintah. Jadi dengan kata lain pemerintah memiliki fungsi untuk memerintah mayoritas atau orang banyak.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam menata system pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa : Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan pembangunan desa atau kelurahan adalah merupakan bagian dari program pembangunan nasional yang dilaksanakan secara merata diseluruh pelosok tanah air. Berhasil tidaknya pembangunan pedesaan salah satunya ditentukan oleh ketetapan program pembangunan melalui administrasi pemerintah Desa. Dilain pihak keberhasilan pembangunan, termasuk partisipasi masyarakat dan adanya campur tangan pemerintah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan tugas ini antara lain menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas, fungsinya dan wewenang. Pemerintahan Desa tidak terlepas dari peran melaksanakan administrasi pemerintah Desa itu sendiri, yang dilaksanakan untuk mengelola segenap kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemsyarakatan desa.

Pemerintahan desa harus dilaksanakan dengan baik sehingga mampu mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan didesa. Berdasarkan penjelasan diatas jelas bahwa desa memiliki kedudukan yang sangat strategi, oleh karena itu pelaksanaan dan penataan administrasi pemerintahan desa mutlak diperlukan sebagai upaya untuk mengembangkan potensi- potensi yang dimiliki desa tersebut yang pada gilirannya mampu meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat.

Disamping itu pemerintah desa dan kelurahan merupakan salah satu aspek yang dianggap penting dalam rangka peningkatan dan pengembangan pemerintah desa serta pelaksanaan pembangunan desa, hal ini karena pemerintah desa merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan desa beserta segenap aspek- aspek tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan yang dibebankan kepadanya.

Peningkatan dan pengembangan pemerintahan desa diharapkan dapat berperan untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi yang dibebanka kepada pemerintahan desa. Dalam struktur pemerintahan desa terdapat seperangkat aparat yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi tersebut sebagai komponen penyelenggaran tugas- tugas pemerintahan desa.

Untuk dapat memberikan hasil yang optimal di dalam pelaksanaan administrasi pemerintah desa maka diperlukan adanya kemampuan yang memadai baik dari segi kemampuan aparat pelaksanaan itu sendiri maupun dari segi fasilitas pendukung, termasuk kondisi pekerjaan yang dilaksanakan, sehingga akan dapat diarahkan kepada adanya kesatuan tindakan. Disamping itu kualitas aparat pemerintah desa yang relatif masih rendah/ terbatas, maka kondisi masyarakat di desa juga mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas dari pemerintah desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pada penelitian ini, peneliti fokus pada kepala desa. Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk lebih jelasnya, maka uraian yang ada dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa tugas Kepala Desa adalah

menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugasnya itu, Kepala Desa mempunyai wewenang:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD).
2. Mengajukan rancangan Peraturan Desa.
3. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
5. Membina kehidupan masyarakat desa.
6. Membina perekonomian desa.
7. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
8. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang undangan.
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Kemudian dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur pada pasal 14 tersebut, maka Kepala Desa mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 15 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
6. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
7. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang undangan.
8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik.
9. Melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
10. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
11. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
12. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
13. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai nilai sosial budaya dan adat istiadat.

14. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Selain itu, Kepala Desa juga berkewajiban untuk melakukan pembangunan desa. Konsep pembangunan khususnya di Indonesia tidaklah terlepas dari pola sistem politik serta sistem administrasi negara yang dianut. Ini terjadi karena administrasi pembangunan adalah administrasi publik yang berperan sebagai agen perubahan dengan tujuan mensukseskan pembangunan dalam berbagai aspeknya (Weidner, dkk dalam Ibrahim, 2009: 3). Berikut ini dapat dilihat daftar nama perangkat Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Perangkat Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

No.	Nama Perangkat Desa	Jabatan
1.	Rudi Zuhelvis, SH	PJ. Kepala Desa
2.	Amrizal	Sekretaris Desa
3.	Lismawaty	Kaur Umum
4.	Yopa Andri	Kaur Perencanaan
5.	Asril	Kaur Keuangan
6.	Indra Muslahir	Kasi Pemerintahan
7.	Indah Susanti	Kasi Kesra
8.	Rozita	Kasi Pelayanan
9.	Parisman	Kepala Dusun Tanah Punjang
10.	Sukoco	Kepala Dusun Paung Butam
11.	Nasir	Kepala Dusun Sebangsa Asal

Sumber : Kantor Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, 2020

Perencanaan pembangunan desa adalah sesuatu yang sangat penting. Karena dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Karena itu sudah menjadi kewajiban pemerintahan desa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Aspirasi masyarakat

dapat tertampung dengan cara melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan tersebut. Karena pada dasarnya merekalah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Penelitian ini akan mengambil lokasi di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Kesumbo Ampai adalah nama desa yang terletak di Kecamatan bathin Solapan, Kabupaten bengkalis Provinsi Riau. Luas Desa Kesumbo Ampai ini sebesar 120 Ha, dengan jumlah penduduk sebanyak 1.829 jiwa. Di desa ini terdapat 3 dusun, 7 RW dan 17 RT.

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada observasi awal yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa pembangunan (fisik) di Desa Keumbo Ampai belum dibidang cukup baik. Program pembangunan Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis direncanakan dan disusun melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan secara aktif dalam setahun sekali sebelum memutuskan program pembangunan yang akan dilakukan, misalnya pada tahun 2019 dilakukan Musrenbang pada hari Rabu, 12 September 2019 jam 09.00 Wib, yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat desa, BPD, kelompok masyarakat.

Pimpinan Musyawarah dan Narasumber :

Pimpinan Musyarawah : Rudi Zuhelvis dari Kepala Desa

Notulen : Nopa Andri dari Perangkat Desa

Narasumber : M. Arsyad (Pendamping Desa)

M. Nasir (BPD)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi selanjutnya peserta musyawarah desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah desa dalam rangka penyusunan RKP desa, yaitu :

1. Semua usulan yang menjadi aspirasi masyarakat diterima untuk menjadi acuan dan bahan pertimbangan
2. Perencanaan pembangunan didasarkan pada kebutuhan dan kemampuan masyarakat serta situasi dan kondisi masyarakat, termasuk memperhitungkan proyeksi kedepan
3. Dilakukan penyeleksian untuk dapat menentukan prioritas program kedgiatan.

Berikut dapat dilihat hasil pelaksanaan pembangunan yang sudah dan belum dilaksanakan tahun 2018 – 2019 :

Tabel 2. Pembangunan yang sudah dan belum dilaksanakan tahun 2018 – 2019 di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

No.	Kegiatan pembangunan	Keterangan		Progres (%)
		Sudah Dilaksanakan	Sedang Dilaksanakan	
Tahun 2018				
1.	Pembangunan Parit Bata Jalan Gajah Tua RT 01 RW 01	√		100%
2.	Pembangunan Parit Bata Jalan Poskesdes RT 01 RW 02	√		100%
3.	Pembangunan Box Culvert Jalan Protokol RT 02 RW 05	√		100%
4.	Pembangunan Box Culvert Jalan SDN 55 RT 01 RW 02	√		100%
5.	Pembangunan Box Culvert RT 01 RW 03	√		100%
6.	Pembangunan Lanjutan Base Jalan Pendidikan		√	60%
7.	Gorong-Gorong SDN 55 RT 01		√	70%

	RW 02			
8.	Gorong-Gorong Jalan Senopal RT 03 RW 03	√		100%
9.	Pembangunan Jalan Semenisasi Gg Rambutan RT 01 RW 02		√	60%
10.	Pembangunan Jalan Semenisasi Jalan Pasir RT 01 RW 06		√	60%
11.	Pembangunan Parit Bata Jalan Senopal RT 03 RW 03	√		100%
Tahun 2019				
1.	Pembangunan Parit Bata Jalan Pasir RT 01 RW 06	√		100%
2.	Pembangunan Jalan Semenisasi Suka Dana RT 03 RW 04	√		100%
3.	Pembangunan Box Culvert Jalan Suka Jadi RT 03 RW 04	√		100%
4.	Pembangunan Jalan Semenisasi Jalan Pasir RT 01 RW 06		√	60%
5.	Galian Parit Jl. Pertanian RT 02 RW 07		√	60%
6.	Galian Parit Jl. Tanah Persatuan RT 01 RW 03		√	60%
7.	Pembangunan Duiker Jalan Tanah Persatuan RT 01 RW 05	√		100%
8.	Gorong-Gorong Jalan Asmara RT 04 RW 04	√		100%
9.	Pembangunan Jalan Semenisasi Gg Rambutan RT 01 RW 02		√	60%
10.	Pembangunan Lanjutan Base Jalan Pendidikan	√		100%
11.	Gorong-Gorong SDN 55 RT 01 RW 02	√		100%

Sumber : Kantor Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

Pertemuan yang ada di Desa Kesumbo Ampai dimulai dari tingkat RT sebulan sekali, kemudian tingkat RW dua bulan sekali, hingga tingkat Desa setahun dua kali. Namun, keseimbangan peran pemerintah-masyarakat tentu tidak bisa dilihat hanya dari intensitas pertemuan yang diadakan. Sebagaimana yang dikatakan di atas bahwa meski pembangunan telah terlaksana cukup baik belum

tentu hasilnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Berdasarkan pengamatan penulis, adapun beberapa fenomena mengenai perencanaan pembangunan desa, yaitu:

1. Kurang efektifnya peran pemerintah desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, hal ini terlihat dari adanya program pembangunan desa yang tidak sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan, misalnya semenisasi jalan yang dimulai pada tahun 2018 namun sampai sekarang belum diselesaikan dengan baik dan tidak selesai dengan tepat waktu yang mana penyelesaian dilanjutkan pada tahun berikutnya di tahun 2019 sementara jalan merupakan hal penting untuk lancarnya transportasi di desa.
2. Kurang efektifnya partisipasi masyarakat desa untuk menentukan program pembangunan desa, misalnya masyarakat tidak bersedia menghadiri rapat atau muswarah yang diselenggarakan pihak pemerintah desa untuk menentukan dan menetapkan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini mengambil judul:

“Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kepala desa dalam pembangunan di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis?

2. Apa sajakah faktor penghambat peran kepala desa dalam pembangunan di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan peran kepala desa di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.
- b. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat peran kepala desa dalam pembangunan di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini antara lain:

- a. Manfaat teoritis, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan tentang administrasi publik yang di pelajari dalam dunia perkuliahan.
- b. Manfaat praktis, untuk memberikan masukan dalam bentuk informasi kepada pemerintah dan *stakeholder* tentang kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan desa.
- c. Manfaat akademis, sebagai referensi ilmu pengeahuan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi Publik

Dinamika perkembangan Ilmu Administrasi Publik senantiasa selaras dengan dinamika perkembangan peradaban zaman dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Demikian pula akselerasi perkembangan ilmu administrasi akan seiring dengan perkembangan paradigmanya. Secara konseptual, minimal dikenal lima paradigma administrasi publik di awal perkembangannya (Nicholas Henry dalam Miftah Thoha, 2008: 18-32) yang dimulai dengan dikotomi politik administrasi, dilanjutkan dengan perkembangan prinsip-prinsip administrasi, administrasi publik sebagai ilmu politik, administrasi publik sebagai ilmu administrasi, dan saat ini administrasi publik sebagai administrasi publik yang berdiri sendiri sebagai salah satu bidang kajian ilmu administrasi.

Secara garis besar, alur perkembangan administrasi publik terbagi atas tiga domain paradigma yakni: *old public administration*, *new public management/reinventing government*, *new public service*. Alur pemikiran klasik (*old public administration*) adalah perkembangan awal administrasi publik sebagai ilmu dengan tokoh pemikir utamanya Woodrow Wilson, Frank Goodnow, dan Leonard D. White. Ciri utama *old public administration* adalah cara pandang yang bersifat struktural-formal dengan perhatian utama pada struktur organisasi, efisiensi, ekonomi, dan rasionalitas. Dalam menganalisis berbagai kegiatan pemerintahan, penekanan aliran ini terutama pada masalah personalia, administrasi keuangan,

tata kerja perkantoran, dan sangat dipengaruhi oleh pemikiran birokrasi ideal Max Weber (Ibrahim, 2009:1).

Senada dengan Ibrahim, Miftah Thoha (2008: 73) mengemukakan ciri khas dari paradigma *old public administration* bahwa jasa pelayanan diberikan langsung oleh instansi pemerintah yang berwenang, administrasi publik berkaitan dengan melaksanakan kebijakan untuk tujuan politik, para administrator bertanggung jawab kepada pimpinan politik, kegiatan administrasi publik dilaksanakan melalui struktur hirarki organisasi dan dengan sistem kontrol, dinilai efisiensi dan rasionalitas, serta keterlibatan warga amat terbatas.

Perkembangan selanjutnya adalah lahirnya paradigma *new public management/reinventing government* sebagai kritik dari paradigma sebelumnya bahwa birokrasi pemerintahan bersifat kaku, rumit, serta pelaksanaannya yang dinilai lamban. Paradigma ini muncul dengan semangat mentransformasikan kinerja pasar ke dalam birokrasi pemerintah, maka sering disebut sebagai paradigma privatisasi. Paradigma ini memandang bahwa seharusnya hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dipahami sebagai hubungan produsen kepada pelanggannya. Dengan transformasi ini, para aparatur pemerintah ditekankan untuk lebih responsif dalam memberikan pelayanan (Santosa, 2009: 68). Senada dengan Santosa, Miftah Thoha (2008: 74) memandang bahwa transformasi ini akan mengganti kebiasaan kinerja sektor publik dari tradisi berlandaskan aturan dan proses yang menggantungkan pada otoritas pejabat menjadi orientasi pasar dengan dipacu kompetisi yang sehat. Lebih lanjut,

perubahan paradigma ini membuat fungsi-fungsi yang selama ini dimonopoli pemerintah mulai dibagi dengan swasta.

Pemikir utama dari munculnya paradigma ini adalah David Osborne dan Ted Gaebler yang memberikan penekanan bahwa konsep *new public management/reinventing government* pada hakikatnya merupakan upaya mengadopsi jiwa dan kinerja wiraswasta (*entrepreneurship*) ke dalam birokrasi pemerintah. Osborn & Gaebler mengemukakan sepuluh prinsip *reinventing government* yakni: pemerintah yang bersifat katalis (mengarahkan daripada mengayuh), pemerintah milik masyarakat (memberi wewenang ketimbang melayani), pemerintah berorientasi misi (mengubah orientasi dari yang digerakkan peraturan menjadi digerakkan misi), menekankan persaingan terbaik dalam memberi pelayanan, membiayai hasil bukan birokrasi, memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pelanggan, menghasilkan daripada membelanjakan, mencegah daripada mengobati, desentralisasi, serta semangat wirausaha (Ibrahim, 2009: 81).

Perkembangan selanjutnya adalah paradigma *new public service* yang muncul sebagai perbaikan dari paradigma sebelumnya dengan menekankan berbagai elemen. Jika di paradigma *old public administration* kegiatan pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik dimonopoli pemerintah, sementara pada era paradigma *new public management* lebih menekankan orientasi pasar dalam melayani masyarakat dengan menganggapnya sebagai pelanggan, maka dalam paradigma *new public service* semua elemen tersebut diupayakan untuk saling bersinergi. Ide dasar ini lahir dari teori *citizenship democratic*

(kewarganegaraan demokratis), *civil society*, organisasi, serta postmodernisme administrasi publik (Miftah Thoha, 2008: 84).

Paradigma ini merupakan awal berkembangnya paradigma *good governance* dimana tiga pilar dalam suatu negara yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat harus saling bersinergi guna mengembangkan produktivitas, ekonomi, dan efisiensi (Bob Sugeng Hadiwinata dalam Santosa, 2009: 131). Untuk mewujudkan *good governance* diperlukan prinsip sebagai berikut:

1. Partisipatoris: setiap pembuatan peraturan dan/atau kebijakan selalu melibatkan unsur masyarakat (melalui wakil-wakilnya);
2. *Rule of law*: perangkat hukum yang menindak para pelanggar, menjamin perlindungan HAM, tidak memihak, berlaku pada semua warga;
3. Transparansi: adanya ruang kebebasan publik bagi warga yang membutuhkan (diatur undang-undang).
4. *Responsiveness*: lembaga publik harus mampu merespon kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar dan HAM.
5. Konsensus: jika ada perbedaan kepentingan yang mendasar di dalam masyarakat, penyelesaian harus mengutamakan cara dialog/musyawarah, menjadi konsensus;
6. Persamaan hak: pemerintah harus menjamin bahwa semua pihak, tanpa terkecuali, dilibatkan dalam proses politik, tanpa ada satu pihak pun yang dikesampingkan;
7. Efektifitas dan efisiensi: pemerintah harus efektif dan efisien dalam memproduksi *output* berupa aturan, kebijakan, pengelolaan keuangan negara, dll;
8. Akuntabilitas: suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misinya;
9. Visi strategis: setiap penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus mempunyai visi jauh ke depan.

2. Konsep Organisasi

Orang mendirikan organisasi mempunyai maksud agar tujuan tertentu dapat dicapai melalui tindakan bersama yang telah disetujui bersama. Dengan organisasi, tujuan dan sasaran dapat dicapai secara lebih efektif dan efisien dengan cara dan tindakan yang dilakukan secara bersama-sama. Idealnya, konsep

dapat dilaksanakan apabila para organisatoris atau manajer yang ada dalam organisasi paham tentang tugas dan tanggung jawabnya.

Definisi organisasi banyak ragamnya, tergantung pada sudut pandang sebagai wadah, sebagai proses, sebagai perilaku, dan alat untuk mencapai tujuan. Namun demikian, definisi organisasi yang telah dikemukakan oleh para ahli organisasi sekurang-kurangnya ada unsur kerjasama, orang yang bekerja sama, dan tujuan bersama yang hendak dicapai.

Menurut Siagian (2003:6) organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Dari definisi diatas menunjukkan bahwa organisasi dapat ditinjau dari dua segi pandangan, yaitu sebagai berikut :

- a. Organisasi sebagai wadah dimana kegiatan-kegiatan administrasi dijalankan.
- b. Organisasi sebagai rangkaian hirarki dan interaksi antara orang-orang dalam suatu ikatan formal.

Menurut Robbin (2000:4) “organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan”.

Menurut Weber (dalam Thoha, 2002:98) bahwa : suatu organisasi atau kelompok kerja sama ini mempunyai unsur kekayaan sebagai berikut :

1. organisasi merupakan tata hubungan sosial, dalam hal ini seseorang individu melakukan proses interaksi sesamanya di dalam organisasi tersebut.
2. organisasi mempunyai batasan-batasan tertentu (*boundaries*), dengan demikian seseorang yang melakukan proses interaksi dengan lainnya tidak atas kemauan sendiri. Mereka dibatasi oleh aturan-aturan tertentu.
3. organisasi merupakan suatu kumpulan tata aturan, yang bisa membedakan ini menyusun proses interaksi di antara orang-orang yang bekerja sama didalamnya, sehingga interaksi tersebut tidak muncul begitu saja.
4. organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur di dalamnya berisi wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan sesuatu fungsi tertentu.

Istilah lain dari unsur ini ialah terdapatnya hirarki (*hierarchy*). Konsekuensi dari adanya hirarki ini bahwa di dalam organisasi ada pimpinan atau kepala dan bawahan atau staf. Menurut Etziomi (dalam Thoha, 2002 : 100), mengemukakan “konsep organisasi sebagai pengelompokan orang-orang yang sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu”.

Pada organisasi tersebut masing-masing personil yang terlibat di dalamnya diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang dikoordinasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dimana tujuan organisasi tersebut dirumuskan secara musyawarah, sebagai tujuan bersama yang diwujudkan secara bersama-sama. Pentingnya organisasi sebagai alat administrasi dan manajemen dalam industri atau dunia kerja lainnya terlihat apabila bergerak tidaknya suatu organisasi ke arah pencapaian tujuan sangat tergantung pada kemampuan manusia dalam menggerakkan organisasi itu ke arah tujuan yang telah ditentukan.

Dengan organisasi tercipta keterpaduan pikiran, konsepsi tindakan dan keterampilan yang dimiliki oleh tiap-tiap personil yang terlibat didalamnya untuk

berhimpun menjadi satu kesatuan kekuatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuannya.

3. Konsep Manajemen

Menurut Prajudi (dalam Syafiie, 2003:268), manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan daripada semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja tertentu.

Pendapat Siagian (2003:5) manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi karena memang manajemen merupakan alat pelaksana utama administrasi.

Menurut Haiman (dalam Manullang, 2004:1) manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam menggerakkan organisasi, seorang pemimpin harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang baik, dimana menurut Terry dan Rue (2001:9) adalah sebagai berikut:

- a. *Planning* (perencanaan)
- b. *Organizing* (organisasi)
- c. *Staffing* (kepegawaian)

- d. *Motivating* (motivasi)
- e. *Controlling* (pengawasan)

Sedangkan menurut Gie (dalam Zulkilfli, 2005 : 28) fungsi manajemen adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan
- b. Pembuat Keputusan
- c. Pengarahan
- d. Pengorganisasian
- e. Penyempurnaan

Menurut Salam (2007:176) manajemen pemerintahan adalah upaya instansi pemerintah untuk mengelola negara agar tercapai ketertiban, kesejahteraan, dan kemakmuran Negara.

Manajemen Pemerintahan Daerah di Indonesia dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan hak otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Hal ini diperkuat oleh ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah yang berisikan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya Nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Soekarno (2006 : 70), aktivitas manajemen dapat dipisahkan dalam aktivitas-aktivitas komponen yang meliputi:

- a. Perencanaan, adalah aktivitas-aktivitas pengumpulan data dan informasi beserta pemikiran untuk menentukan apa yang hendak dicapai, di mana semuanya itu harus dijalankan, bila mana waktunya, oleh siapa-siapa saja yang harus menjalankan.
- b. Pengorganisasian, adalah tindak lanjut untuk menyambut pelaksanaan rencana yang telah ditentukan untuk dilaksanakan.

- c. Pengkoordinasian, adalah meliputi hubungan kerja sama secara teratur dan lancar dan berbagai macam aktivitas yang harus dilaksanakan.
- d. Pengendalian, adalah mengarahkan agar seluruh aktivitas ataupun usaha tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.
- e. Pengawasan, adalah suatu usaha agar semua dan keputusan yang telah dibuat dapat dikerjakan sesuai dengan apa yang direncanakan, diputuskan, dan dikomandokan.

Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi actuating (Pelaksanaan) justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi.

4. Konsep Peran

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan seseorang dalam struktur sosial karena kedudukannya melakukan suatu tindakan atau gerak perubahan yang dinamis, dimana dari pola tindakan tersebut mengakibatkan terjadinya suatu hal atau peristiwa (Soekanto, 2010: 2). Status atau kedudukan tidak dapat dipisahkan dengan peran. Dan tidak ada peran tanpa kedudukan. Manusia memiliki perannya masing-masing sesuai dengan pola dan kapasitasnya (status atau kedudukan) dalam pergaulan sosial.

Menurut Rivai (2004: 148) peran merupakan prilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan. Lebih lanjut Rivai mengaitkan peran sebagai tolak ukur kinerja seseorang. Peran dapat dijadikan tolak ukur seseorang sebagai pemimpin apakah orang itu dapat

memaksimalkan kinerjanya dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya ataukah tidak.

Sebelum membicarakan lebih banyak mengenai peran pemerintah, ada baiknya untuk membahas tentang fungsi Pemerintah sendiri, dalam hal ini Pemerintah Daerah. Fungsi Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomer 23 tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- c. Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah Pusat, dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya.

Dalam menjalankan fungsinya Pemerintah Daerah diberikan keleluasaan untuk mengatur daerahnya sendiri dalam berbagai urusan kecuali urusan pertahanan keamanan, moneter, kehakiman, hubungan luar negeri, dan agama (Arsiyah). Kepala Daerah dalam hal ini berperan sebagai alat daerah dan alat Pemerintah Pusat. Sebagai alat daerah tugasnya adalah menjalankan hak, kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah; mewakili daerah di dalam dan di luar pengadilan; serta bersama-sama dengan DPRD membuat Anggaran Pendapatan Daerah atau Peraturan Daerah. Sedangkan sebagai alat Pemerintah Pusat Kepala Daerah mempunyai tugas untuk membina ketentraman dan ketertiban di wilayahnya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah; melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang pembinaan persatuan bangsa; menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan instansi vertikal

dan horizontal dengan masing-masing daerah, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan; membimbing dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah; mengusahakan secara terus-menerus agar segala peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah dijalankan oleh Instansi Pemerintah dan Instansi Pemerintah Daerah serta pejabat yang ditugaskan; melaksanakan segala tugas Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepadanya; serta melaksanakan segala tugas pemerintah yang tidak termasuk tugas instansi lainnya.

Kaitannya dengan peran, seorang pemimpin idealnya memang mempunyai peran yang lebih banyak dibanding yang dipimpin. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa kedudukan seseorang menentukan peran, atau peran menentukan kedudukan. Artinya, semakin tinggi kedudukan sosial seseorang, maka perannya pun juga semakin banyak. Terkait dengan peran seorang pemimpin, Arifin (2012: 104-118) dalam bukunya *Leadership* menyebutkan beberapa peran yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu:

1. Sebagai penentu arah;
2. Sebagai wakil dan juru bicara organisasi;
3. Sebagai komunikator yang efektif;
4. Sebagai mediator; dan
5. Sebagai integrator

Dalam kaitannya dengan pemerintah desa, maka peran pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan dapat dilihat sebagai penentu arah. Maksudnya disini adalah pemerintah desa memberikan poin-poin dan arahan-arahan kepada masyarakat dalam proses merumuskan perencanaan

pembangunan. Sementara dalam perannya sebagai wakil dan juru bicara organisasi dalam hal ini dapat merujuk bahwa pemerintah desa melakukan koordinasi yang baik kepada seluruh *stakeholder* desa mulai dari tokoh masyarakat, pemuka agama, hingga ketua RT/RW. Sejalan dengan hal itu, pemerintah desa juga berperan sebagai komunikator yang efektif dengan pihak-pihak yang terkait dengan perencanaan pembangunan. Juga, sebagai mediator untuk menengahi konflik yang timbul dalam suatu proses rumusan perencanaan pembangunan. Sementara sebagai integrator, pemerintah desa berperan untuk menyatukan kelompok-kelompok yang saling bertentangan agar pembangunan desa dapat berjalan dengan baik.

Senada dengan Arifin, Robbins & Coulter (2009: 11 -12) mengelompokkan peran manajer ke dalam 3 peran, yakni:

1. Peran jembatan antar pribadi (*Interpersonal Roles*), meliputi peranan-peranan yang melibatkan hubungan dengan orang lain (para bawahan dan orang-orang di luar organisasi) dan aktivitas lainnya yang bersifat testimonial dan simbolis.
2. Peran penyambung informasi (*Informational Roles*), meliputi aktivitas-aktivitas pengumpulan, penerimaan, dan penyampaian informasi. Di sini manajer berperan sebagai pengawas, penyebar berita, dan juru bicara.
3. Peran pengambil keputusan, mencakup hal-hal yang terkait dengan pengambilan keputusan dan penentuan pilihan. Dalam kategori ini manajer dapat berperan sebagai pengusaha (*inisiator, enterprenuer*), pengentas kendala, pengalokasi sumber daya, dan perunding.

Peran pemerintah secara umum menurut Kuncoro (2004: 110-111) meliputi peran minimal, peran antara, dan peran aktif. Peran minimal dapat berupa menyediakan barang-barang publik, pertahanan, keamanan, manajemen ekonomi, dan penyediaan fasilitas kesehatan. Sementara peran antara dapat berupa perlindungan lingkungan, pendidikan dasar, pengatur kebijakan, mengendalikan

informasi, perlindungan konsumen. Peran aktif dapat berupa koordinasi kegiatan swasta, mendukung fungsi pasar, memberikan inisiatif. Lebih lanjut, Kuncoro menjelaskan peran-peran pemerintah dapat terbagi sebagai: wirausaha, koordinator, fasilitator, dan stimulator.

Adisasmita (2006:11) lebih mengerucutkan peran pemerintah desa dalam pembangunan yaitu sebagai penyampai pesan pembangunan, pengaruh masyarakat untuk berpartisipasi dan penyalur aspirasi masyarakat. Peranan tersebut sangat berpengaruh terutama dalam upaya untuk menciptakan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat perdesaan

Sebagai wirausaha, pemerintah berperan untuk mengembangkan potensi daerahnya untuk menciptakan peluang kerja. Sedangkan sebagai koordinator peran pemerintah adalah mengkoordinasi berbagai kelompok kepentingan untuk merencanakan dan menetapkan program pembangunan. Sebagai fasilitator, pemerintah menampung berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat untuk dikerucutkan pada satu tujuan yang jelas. Sedangkan sebagai stimulator pemerintah menstimulasi masyarakat untuk menciptakan dan mengembangkan usaha melalui tindakan-tindakan khusus.

Sementara itu Siagian (2012: 142-150) menguraikan beberapa peran pemerintah dalam pembangunan yaitu peran selaku stabilitator, peran selaku inovator, peran selaku modernisator, peran selaku pelopor, serta peran selaku pelaksana sendiri. Pembangunan akan efektif bila situasi politik, ekonomi, sosial-budaya serta pertahanan keamanan dalam kondisi yang stabil. Jika aspek-aspek tersebut dalam kondisi yang labil, maka pembangunan terhambat bahkan tidak

berjalan. Dalam hal ini peran pemerintah sangat penting untuk menstabilkan kondisi tersebut.

Melalui pembangunan setiap negara ingin menjadi negara yang modern. Implikasinya adalah kuat dalam mempertahankan kedaulatan kemerdekaan dengan tetap menyadari pentingnya bekerja sama dengan negara lain, mandiri, serta sederajat dengan negara lainnya. Maka selaku modernisator, pemerintah mendorong warganya untuk melakukan proses modernisasi tersebut melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengolah dengan baik kekayaan alam yang dimiliki, menjadi sumberdaya yang produktif, dan sebagainya. Hal itu dapat tercapai dengan terlebih dahulu mengimplementasikannya di lingkungan birokrasi pemerintahan sendiri.

Pemerintah sebagai pelopor berperan untuk menjadi panutan warganya dalam bekerja produktif dan berdedikasi tinggi, kejujuran memberantas korupsi, penegakan disiplin kerja, ketaatan pada aturan, kepedulian terhadap lingkungan, peningkatan efisiensi dengan tidak bergaya hidup boros, peningkatan keterampilan dengan terus melakukan pemutakhiran melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan kepeloporan tersebut masyarakat akan dengan mudah mengubah pandangan dan prilakunya untuk sesuai dengan pola-pola tersebut sehingga pembangunan berjalan dengan baik.

Adisasmita (2006: 11) lebih mengerucutkan peran pemerintah desa dalam pembangunan yaitu sebagai penyampai pesan pembangunan, pengarah masyarakat untuk berpartisipasi dan penyalur aspirasi masyarakat. Peranan

tersebut sangat berpengaruh terutama dalam upaya untuk menciptakan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.

Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan tindakan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai status atau kedudukan yang dimilikinya dalam kehidupan masyarakat. Peran seorang pemimpin tidaklah sama dengan peran orang yang dipimpin. Peran pemimpin secara umum meliputi peran sebagai pelopor, inovator, fasilitator, stabilitator, sekaligus mediator bagi berbagai kepentingan warga yang dipimpinnya. Kaitannya dengan pembangunan, peran-peran tersebut harus saling berkesinambungan. Artinya, seorang pemimpin harus menjalankan berbagai peran tersebut sesuai konteksnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga saat evaluasi pembangunan.

5. Konsep Pemerintah Desa

Undang Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten atau kota. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No.23 Tahun 2014).

Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia yang keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah. Peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam Pemerintah Desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warganya.

Menurut kamus Wikipedia bahasa Indonesia Pemerintah menurut etimologi berasal dari kata “Perintah” yang berarti suatu individu yang memiliki tugas sebagai pemberi perintah. Definisi dari Pemerintahan adalah suatu lembaga yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang mengatur suatu masyarakat yang memiliki cara dan strategi yang berbeda-beda dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat tertata dengan baik. Begitupun dengan keberadaan pemerintahan desa yang telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka.

Sementara itu dalam sistem pemerintahan Indonesia juga dikenal pemerintahan desa dimana dalam perkembangannya desa kemudian tetap dikenal dalam tata pemerintahan di Indonesia sebagai tingkat pemerintahan yang paling bawah dan merupakan ujung tombak pemerintahan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu juga banyak ahli yang mengemukakan pengertian tentang desa diantaranya menurut Roucek dan Warren (dalam buku syarifin dkk:Hukum Pemerintah Daerah, 2005:78) yang mengemukakan mengenai pengertian desa yaitu desa sebagai bentuk yang diteruskan antara penduduk dengan lembaga mereka di wilayah tempat dimana mereka tinggal yakni di ladang-ladang yang berserak dan di kampung-kampung yang biasanya menjadi pusat segala aktifitas bersama masyarakat berhubungan satu sama lain, bertukar jasa, tolong-menolong atau ikut serta dalam aktifitas-aktifitas sosial”.

Widjaja (2005:3), mengemukakan mengenai pengertian dari desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa dimana landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Koentjaraningrat dkk (2005:271), mengemukakan bahwa desa sekarang merupakan kesatuan-kesatuan administratif gabungan-gabungan sejumlah kampung-kampung lama yang disebut desa-desa gaya baru.

Selain itu tinjauan tentang desa juga banyak ditemukan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang memberikan penjelasan mengenai pengertian desa yang dikemukakan bahwa: Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa : “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa : “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa : “Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai administrasi penyelenggara pemerintah desa”.

Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 202 menjelaskan pemerintah desa secara lebih rinci dan tegas yaitu bahwa pemerintah terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa, adapun yang disebut perangkat desa disini adalah Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan, seperti Kepala Urusan, dan unsur kewilayahan seperti Kepala Dusun atau dengan sebutan lain.

Di desa dibentuk pemerintahan desa merupakan subsistem dari system penyelenggaraan pemerintah sehingga desa memiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab pada BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada bupati. Dalam menjalankan pemerintah desa, pemerintah desa menerapkan prinsip koordinasi,

integrasi, dan sinkronisasi. Sedangkan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, kepala desa:

- a. Bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD; dan
- b. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati tembusan Camat.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama dalam bidang pembangunan Kepala Desa dapat dibantu lembaga kemasyarakatan yang ada di desa, sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris desa, kepala seksi, dan kepala dusun berada dibawah serta tanggung jawab kepada Kepala Desa, sedang kepala urusan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris desa.

Menurut UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 209, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa adalah sebagai berikut:

- 1) Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- 2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- 3) Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten atau kota
- 4) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangundangan diserahkan kepada desa.

6. Konsep Kepala Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 tentang Desa, dalam struktur organisasi pemerintahan desa, Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintah

Desatertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Kepala Desa diangkat dan dilantik oleh bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa warga negara Republik Indonesia dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Kepala desa berkedudukan sebagai sebagai alat Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa bukan saja menjalankan pemerintahan, membina ketertiban dan ketentraman, menjaga supaya hukum yang dilanggar dapat dipulihkan seperti sediakala, tetapi juga agar orang-orang yang melanggar hukum itu tidak mengulangi lagi perbuatannya dan orang-orang yang telah didamaikan benar-benar damai seperti semula.

Kepala Desa adalah kepala organisasi pemerintahan desa yang berkedudukan strategis dan mempunyai tanggung jawab yang luas. Tanggung jawab meliputi urusan tugas pekerjaan yang terpisah dan terbagi kepada pejabat instansi pemerintah berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentraliasi, sedangkan di desa tanggung jawab urusan tugas pelayanan itu terpusat pada Kepala Desa. Tanggung jawab urusan tugas pekerjaan itu dapat dilaksanakan sendiri oleh Kepala Desa atau melalui orang lain.

Menurut Widjaja (2008:27) “Kepala Desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya.

Kepala desa mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota, memberikan laporan keterangan

pertanggungjawaban kepada Bamusdes, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkannya kepada pemerintah melalui bupati dan tembusan camat.
- b. Membina kehidupan masyarakat desa.
- c. Membina perekonomian desa.
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, di bantu oleh lembaga adapt desa.
- f. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.
- g. Mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai peraturan desa.
- h. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang didesa bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, kepala desa mempunyai wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pelaksanakan tugasnya kepala desa mempunyai wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan

rancangan peraturan desa, menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Widjaja (2008:28) Pertanggungjawaban Kepala Desa dilakukan Kepala Desa agar sendi tanggung jawab pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan Kepala Desa kepada rakyat melalui BPD dapat dilihat sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat (demokrasi) dan perwujudannya ditingkat desa.

7. Konsep Pembangunan Desa

Menurut Solihin (2002;111) pembangunan adalah Suatu usaha untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, dengan mempertimbangan kemampuan sumber daya, kemajuan teknologi dan memperhatikan perkembangan global.

Pembangunan di desa merupakan pembangunan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu dengan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat, dimana pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan, dan fasilitas yang diperlukan. Sedangkan masyarakat memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarya dan swadaya gotong – royong masyarakat

pada setiap pembangunan yang diinginkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan (Tjahja Supriatna, 2000: 10) Prinsip – Prinsip Pembangunan Desa (Tjahja Supriatna, 2000: 13) adalah:

- a. Imbangan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat
- b. Dinamis dan berkelanjutan
- c. Menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi

Tujuan pembangunan desa jangka pendek adalah menunjang atau mendukung keberhasilan pembangunan sektor – sektor yang mejadi prioritas desa untuk meningkatkan produksi, perluasan lapangan kerja, pemerataan dan penyebaran penduduk, pengembangan koperasi, Keluarga Berencana (KB), pendidikan dan kesehatan. Tujuan pembangunan desa jangka panjang adalah mengembangkan seluruh desa di Indonesia menjadi desa swasembada melalui tahap – tahap pengembangan desa swadaya dan desa swakarya dengan memperhatikan keserasian hubungan antara pedesaan dengan perkotaan, imbangan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat serta keterpaduan yang harmonis antar berbagai program sektoral/regional/inpres dan partisipasi masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dalam rangka pemerataan pembangunan keseluruh wilayah Indonesia. (Tjahja Supriatna, 2000:64).

Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dapat dilihat dalam berbagai segi:

1. Pembangunan desa merupakan suatu “proses” perubahan dari cara hidup tradisional masyarakat pedesaan menuju cara hidup yang lebih baik dan

maju. Sebagai proses maka pembangunan desa lebih ditekankan pada aspek perubahan yang terjadi dalam kehidupan rakyat, baik yang menyangkut segi – segi sosial maupun segi – segi psikologi.

2. Pembangunan desa merupakan suatu “metode” yang mengusahakan agar rakyat berkemauan membangun diri mereka sendiri sesuai dengan kemampuan dan sumber - sumber yang mereka miliki. Pembangunan desa sebagai suatu metode lebih menekankan pada tujuan yang ingin dicapai.
3. Pembangunan desa merupakan sebagai suatu “program” untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat pedesaan lahir dan batin. Sebagai suatu program pembangunan desa lebih ditekankan pada bidang dan kegiatan yang dilakukan.
4. Pembangunan desa merupakan suatu “gerakan” untuk memajukan masyarakat sesuai dengan cita – cita nasional Bangsa Indonesia, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sebagai gerakan maka pembangunan desa ditekankan pada kerangka ideologis yang mendasari dan mengarahkan proses, metode, dan program pembangunan desa itu sendiri.

Secara umum pembangunan desa dapat berbentuk pembangunan fisik dan non fisik atau pembangunan mental dan spiritual.

- a. Pembangunan fisik, berupa pembangunan sarana dan prasarana, misalnya: jembatan, gorong – gorong, kebun percontohan, MCK, sarana ibadah dan lain – lain.

- b. Pembangunan non fisik, berupa pembangunan mental dan spiritual, misalnya: penyuluhan pertanian, kesehatan keluarga, penyuluhan P-4, kejar paket A, paket B, perbaikan gizi dan makanan.

Berdasarkan pembiayaannya, pembangunan desa dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Pembangunan oleh pemerintah, yang terdiri dari:
 - a. Pembangunan melalui Inpres
 - b. Pembangunan tidak melalui Inpres
2. Pembangunan oleh masyarakat desa, yang terdiri dari:
 - a. Pembangunan atas daya desa
 - b. Pembangunan atas daya masyarakat desa

Pembangunan Inpres adalah pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat berupa pembangunan jembatan, jalan, dan lain – lain yang tidak memungkinkan pemerintah desa ataupun pemerintah daerah. Pembangunan bukan Inpres adalah pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah daerah meskipun yang dibangun termasuk urusan desa, misalnya: pembangunan pasar. Pembangunan atas daya desa adalah pembangunan yang dibiayai oleh desa menurut anggaran belanja desa. Pembangunan atas daya masyarakat desa adalah pembangunan yang langsung diselenggarakan oleh, dari dan untuk masyarakat. Pokok – pokok kebijaksanaan pembangunan desa (Tjahja Supriatna, 2000:85) adalah:

- a. Pemanfaatan sumberdaya manusia dan potensi alam
- b. Pemenuhan kebutuhan esensial masyarakat

- c. Peningkatan prakarsa dan swadaya gotong – royong masyarakat
- d. Pengembangan tata desa yang teratur dan serasi
- e. Peningkatan ekonomi yang koperatif

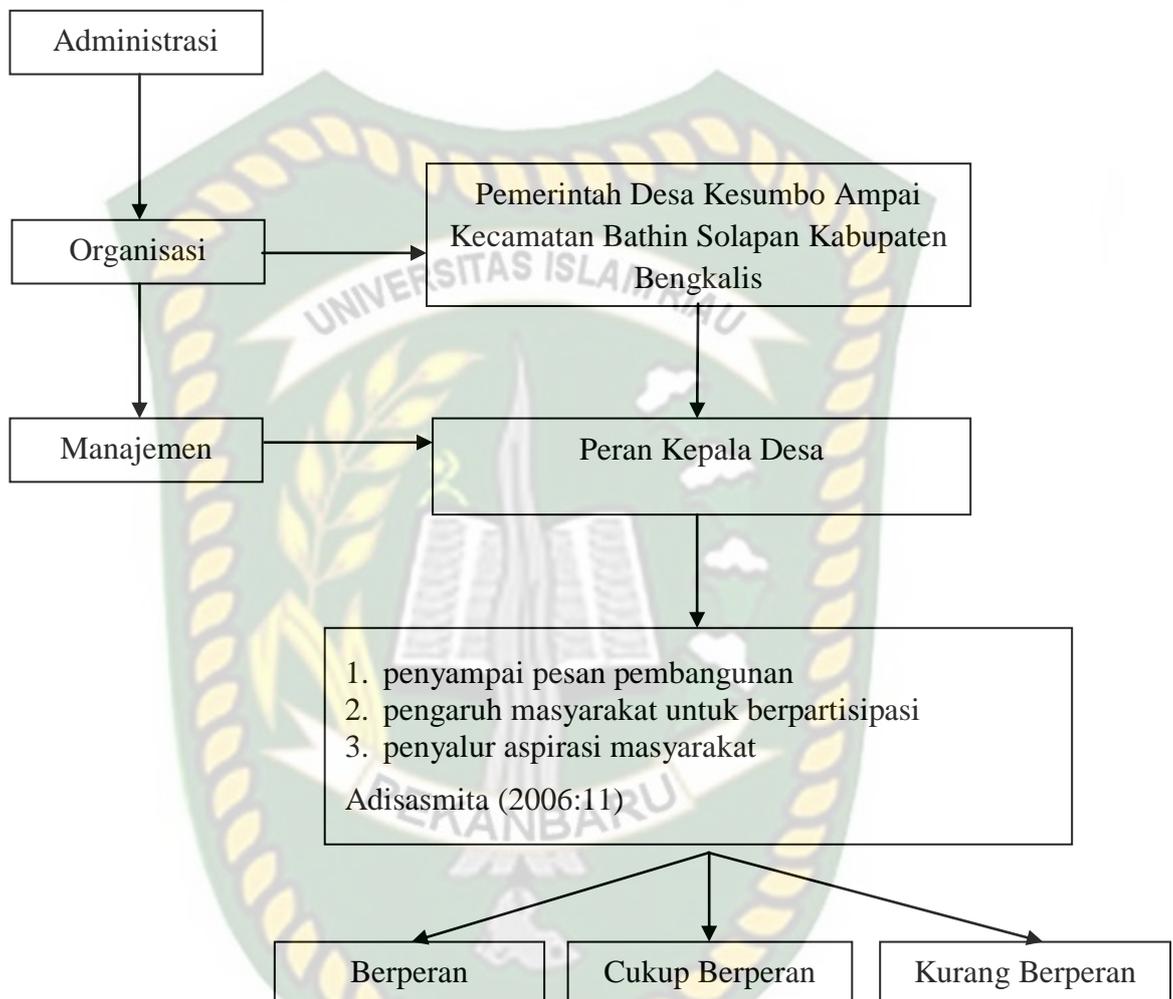
Pembangunan masyarakat desa adalah seluruh pembangunan yang berlangsung di pedesaan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong – royong masyarakat (G. Satari, 2007: 66). Dalam hubungan ini pembangunan desa untuk memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya alam dan mengembangkan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan keterampilan, meningkatkan prakarsa dengan mendapatkan bimbingan dan bantuan dari aparat pemerintah sesuai dengan bidang tugas masing – masing. Dalam program desa terpadu, sasaran yang ingin di capai dari pembangunan desa adalah pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat yang meliputi antara lain:

1. Pembangunan prasarana yang meliputi prasaran produksi, perhubungan, pemasaran, prasarana sosial dan prasarana lainnya.
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
3. Memperluas kesempatan dan lapangan kerja baru.
4. Meningkatkan kesehatan dan lingkungan desa melalui program kebersihan, keindahan dan ketertiban.

B. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran adalah untuk membantu menjelaskan pemikiran dan konsep dalam menganalisis dan memecahkan masalah.

Gambar II.1 Kerangka Pikir Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis



Sumber : Modifikasi Penelitian, 2020

C. Konsep Operasional

Untuk menjelaskan tentang variabel yang dianalisis dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep operasional sebagai berikut :

1. Administrasi merupakan suatu fungsi yang memegang peranan penting terhadap tercapainya kelancaran usaha kegiatan, maupun aktivitas yang dilakukan oleh organisasi.

2. Administrasi publik adalah seluruh upaya penyelenggaraan pemerintah yang meliputi kegiatan manajemen pemerintah (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pembangunan) dengan sebuah mekanisme kerja serta dukungan sumber daya manusia.
3. Organisasi adalah sekelompok orang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu.
4. Manajemen adalah proses untuk menciptakan, memelihara, dan mengoperasikan organisasi perusahaan dengan tujuan tertentu melalui upaya manusia yang sistematis, terkordinasi, dan kooperatif.
5. Pemerintah dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan seseorang dalam struktur sosial karena kedudukannya melakukan suatu tindakan atau gerak perubahan yang dinamis, dimana dari pola tindakan tersebut mengakibatkan terjadinya suatu hal atau peristiwa.
9. Pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa.
10. Peran pemerintah desa dalam pembangunan yaitu sebagai penyampai pesan pembangunan, pengaruh masyarakat untuk berpartisipasi dan penyalur aspirasi masyarakat. Peranan tersebut sangat berpengaruh terutama dalam upaya untuk menciptakan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.
11. Penyampai pesan pembangunan yaitu kepala desa sebagai penampung dan penyampai pesan masyarakat untuk dapat menetapkan program pembangunan desa.
12. Pengaruh masyarakat untuk berpartisipasi yaitu kepala desa sebagai pemimpin yang memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan pembangunan di desa.
13. Penyalur aspirasi masyarakat yaitu kepala desa yang menerima aspirasi masyarakat kemudian menyalurkan aspirasi tersebut untuk dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan.

E. Operasional Variabel

Operasional variabel dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel, uraian konsep, variabel, indikator, ukuran skala, untuk mendapat hasil penelitian yang baik dan akurat.

Tabel 2.2 Operasional Variabel Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

Konsep	Varibel	Indikator	Item Penilaian	Skala Ukur
1	2	3	4	5
Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan seseorang dalam struktur sosial karena kedudukannya melakukan suatu tindakan atau gerak perubahan yang dinamis, dimana dari pola tindakan tersebut mengakibatkan terjadinya suatu hal atau peristiwa (Soekanto, 2010: 2)	Peran Pemerintah Desa	penyampai pesan pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa dan perangkat desa sebagai penentu kerarah mana pembangunan yang dilakukan 2. Pemerintah desa menentukan pembangunan dibidang apa yang harus di dahulukan 3. Pemerintah desa sebagai solusi apabila terjadi ada permasalahan di tengah masyarakat 	Berperan Cukup Berperan Kurang Berperan
		pengaruh masyarakat untuk berpartisipasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah desa pemimpin atas program pembangunan yang dilakukan 2. Pemerintah desa merupakan wakil dari seluruh masyarakat 3. Pemerintah desa mneggerakkan masyarakat untuk bergotong royong 	Berperan Cukup Berperan Kurang Berperan

		penyalur aspirasi masyarakat	1. Pemerintah desa sebagai wadah aspirasi masyarakat 2. Pemerintah desa menjalin komunikasi yang baik 3. Pemberi informasi	Berperan Cukup Berperan Kurang Berperan
--	--	------------------------------	--	---

Sumber : Modifikasi Penulis, 2020

F. Teknik Pengukuran

Pengukuran terhadap variabel dan indikator dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam tiga katagori yaitu Berperan, Cukup Berperan, Kurang Berperan. Untuk mengarahkan analisis data, uraian dari masing-masing pengukuran variabel Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dengan ukuran:

1. Berperan

Apabilah Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dengan 5 indikator berada pada persentase 67 % - 100 %

2. Cukup Berperan

Apabilah Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dengan 5 indikator berada pada persentase 34 % - 66 %

3. Kurang Berperan

Apabila Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dengan 5 indikator berada pada persentase 1 % - 33 %

Untuk pengukuran terhadap masing-masing indikator sebagai berikut:

1. Penyampai Pesan Pembangunan

Berperan

Apabila indikator kejelasan tujuan yang hendak dicapai dalam kategori baik atau berada pada persentase 67 % -100%.

Cukup Berperan

Apabila indikator kejelasan tujuan yang hendak dicapai dalam kategori cukup baik atau berada pada persentase 34 % -66 %.

Kurang Berperan

Apabila indikator kejelasan tujuan yang hendak dicapai dalam kategori cukup baik atau berada pada persentase 1 % -33%.

2. Pengaruh Masyarakat Untuk Berpartisipasi

Berperan

Apabila indikator kejelasan strategi pencapaian tujuan dalam kategori baik atau berada pada persentase 67 % -100%.

Cukup Berperan

Apabila indikator kejelasan strategi pencapaian tujuan dalam kategori cukup baik atau berada pada persentase 34 % -66 %.

Kurang Berperan

Apabila indikator kejelasan strategi pencapaian tujuan dalam kategori cukup baik atau berada pada persentase 1 % -33%.

3. Penyalur Aspirasi Masyarakat**Berperan**

Apabila indikator perencanaan yang matang dalam kategori baik atau berada pada persentase 67 % -100%.

Cukup Berperan

Apabila indikator perencanaan yang matang dalam kategori cukup baik atau berada pada persentase 34 % -66 %.

Kurang Berperan

Apabila indikator perencanaan yang matang dalam kategori cukup baik atau berada pada persentase 1 % -33%.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan penulis gunakan adalah bersifat deskriptif kuantitatif, yaitu suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui, menyangkut bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis tersebut. Penggunaan penelitian kuantitatif dipandang jauh lebih subyektif karena untuk memahami fenomena lebih baik dalam suatu kelompok tertentu yang dipelajari, dan untuk membuat inferensi tentang kelompok yang lebih besar melebihi yang dipelajari. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Alasan penulis memilih lokasi penelitian disini yaitu Pemerintah Desa Kesumbo Ampai belum optimal dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan gejala/suatu yang ingin diteliti, sementara sampel merupakan bagian bagian populasi yang ingin diteliti, (Sugyono, 2010: 90).

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, BPD Desa Kesumbo Ampai, Ketua RW, Ketua RT, dan dan masyarakat, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel III.1 Jumlah Populasi dan Sampel

No	Populasi	Jumlah		
		Populasi	Sampel	Persentase
1	2	3	4	5
1.	Kepala Desa	1	1	100%
2.	Ketua BPD	1	1	100%
3.	Anggota BPD	7	7	100%
4.	Kepala Dusun	3	3	100%
5.	Ketua RW	4	4	100%
6.	Ketua RT	11	11	100%
7.	Tokoh Masyarakat	10	10	100%
Jumlah		37	37	-

Sumber : Modifikasi Penulis, 2020

D. Teknik Penarikan Sampel

Menurut Sugyono (2010: 96) sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh atau sensus, dimana semua anggota populasi di jadikan sampel.

Teknik penarikan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah untuk Kepala Desa, BPD, dan Kepala Dusun menggunakan penarikan *Non Probability Sampling* dengan metode *Sensus Sampling* yang merupakan teknik penentuan sampel dimana semua anggota populasi dapat dijadikan sampel penelitian.

Sedangkan untuk masyarakat di Desa Kesumbo Ampai penulis menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. (Sugiyono, 2012 : 68)..

E. Jenis dan Sumber Data

Menurut Neuman (2013:57), data dalam penelitian kualitatif terdiri dari berbagai macam bentuk, yakni foto, peta, wawancara terbuka (menggali informasi dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada responden), observasi (melihat, mengamati, dan mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti), dokumentasi (penambahan informasi melalui data-data yang telah ada), dan sumber data lainnya. Data yang dipakai dalam penelitian ini harus melalui proses pertimbangan sesuai dengan teori dan masalah yang akan ditelaah, sehingga akan didapat informasi yang akan menjawab tujuan dari penelitian ini. Data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi :

a. Data Primer

Lofland dalam Moloeng (2006: 157) menyatakan data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari lapangan. Data primer penelitian ini adalah hasil wawancara mendalam yang dilakukan antara peneliti dan informan. Informan yang dipilih adalah informan yang dianggap mengetahui kebenaran yang terjadi di lapangan dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan terkait Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa.

b. Data Sekunder

Lofland dalam Moloeng (2006: 157) menyatakan data sekunder merupakan data yang diperlukan dalam penelitian ini untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data tambahan yang diperoleh dari sumber lain yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini yang dimaksud data sekunder adalah buku, skripsi, jurnal, *website* dan Undang-undang

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan. Sugiyono (2013: 63) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara dan dokumentasi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

- b. Kuisisioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan beserta alternatif jawaban yang diberikan kepada responden. Responden menjawab pertanyaan sesuai dengan keadaan indikator variabel penelitian, daftar pertanyaan secara tertulis di berikan kepada responden untuk mendapatkan masalah yang telah diteliti.
- c. Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan responden yang mengacu pada pedoman wawancara yang telah dibuat.
- d. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sumber-sumber data sekunder yang berhubungan dengan masalah penelitian yang ada di lokasi penelitian. Dokumen ini dapat berupa data-data penting seperti struktur organisasi dan gambaran umum Desa Kasumbo Ampai.

G. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data digunakan metode deskriptif, di mana data yang telah dikumpulkan selanjutnya dikelompokkan menurut jenisnya dalam sebuah tabel, kemudian data tersebut di analisis dan di hubungkan dengan teori-teori dalam bentuk uraian sehingga kesimpulan dapat diambil.

Tabel III.2 Jadwal Penelitian Tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke-																	
		Februari				Maret				Juli				Agustus				September	
1	Persiapan dan Penyusunan UP	■																	
2	Seminar Up					■													
3	Revisi UP									■									
4	Penelitian Lapangan									■									
5	Analisis Data									■									
6	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)													■					
7	Konsultasi Revisi Skripsi													■					
8	Ujian Komfretif Skripsi													■					
9	Revisi Skripsi													■					
10	Penggandaan Skripsi													■					

Sumber : Modifikasi Penulis, 2020

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis

Secara historis wilayah Kabupaten Bengkalis sebelum Indonesia merdeka, sebagian besar berada di wilayah pemerintahan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Setelah diproklamirkannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diikuti dengan penyerahan kekuasaan oleh Raja Kerajaan Siak Sri Indrapura Sultan Syarif Kasim II, maka seluruh wilayah yang berada dibawah kekuasaan Kerajaan Siak Sri Indrapura, termasuk wilayah Kabupaten Bengkalis berada di bawah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian pada tahun 1956 yakni berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 dibentuklah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, yang pada waktu itu masih berada dibawah Propinsi Sumatera Tengah dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Sumatera Utara. Dengan dibentuknya Propinsi Daerah Tingkat I Riau berdasarkan Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Riau dan Jambi, maka Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis berada dalam Propinsi Daerah Tingkat I Riau.

Selanjutnya setelah terjadi pemekaran daerah, kabupaten Bengkalis yang semula jumlah penduduknya merupakan jumlah penduduk terbanyak di Propinsi Riau yaitu dengan jumlah 1.182.267 jiwa namun setelah pemekaran menjadi 545.737 jiwa dengan luas wilayah yang semulanya 30.646,83 Km² menjadi 7.773,93 Km².

Kabupaten Bengkalis adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Wilayahnya mencakup daratan bagian timur pulau Sumatera dan wilayah kepulauan, dengan luas adalah 7.793,93 km². Ibukota kabupaten ini berada di Bengkalis tepatnya berada di Pulau Bengkalis yang terpisah dari Pulau Sumatera. Pulau Bengkalis sendiri berada tepat di muara sungai Siak, sehingga dikatakan bahwa pulau Bengkalis adalah delta sungai Siak. Kota terbesar di kabupaten ini adalah kota Duri di kecamatan Mandau.

Penghasilan terbesar Kabupaten Bengkalis adalah minyak bumi yang menjadi sumber terbesar APBD-nya bersama dengan gas. Kabupaten Bengkalis mempunyai letak yang sangat strategis, karena dilalui oleh jalur perkapalan internasional menuju ke Selat Malaka. Bengkalis juga termasuk dalam salah satu program *Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle* (IMS-GT) dan *Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle* (IMT-GT). Kabupaten Bengkalis terletak di sebelah timur Pulau Sumatera yang mencakup area seluas 7.793,93 Km² dengan batas sebagai berikut:

<u>Utara</u>	<u>Selat Malaka</u>
<u>Selatan</u>	<u>Kabupaten Siak</u>
<u>Barat</u>	<u>Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Rokan Hulu</u>
<u>Timur</u>	<u>Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Karimun</u>

Bengkalis merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata sekitar 2-6,1 m dari permukaan laut. Sebagian besar merupakan tanah organosol, yaitu jenis tanah yang banyak mengandung bahan organik. Di daerah ini juga terdapat beberapa sungai, tasik (danau) serta 24 Pulau besar dan kecil. Beberapa di antara pulau besar itu adalah Pulau Rupat (1.524,84 km²) dan Pulau Bengkalis (938,40 km²).

Bengkalis mempunyai iklim tropis yang sangat dipengaruhi oleh iklim laut dengan temperatur 26 °C – 32 °C. Musim hujan biasa terjadi sekitar bulan September – Januari dengan curah hujan rata-rata berkisar antara 809 - 4.078 mm/tahun. Periode musim kering (musim kemarau) biasanya terjadi antara bulan Februari hingga Agustus.

Secara Administrasi Pemerintah, Kabupaten Bengkalis terbagi dalam 8 Kecamatan, 102 Kelurahan/ Desa dengan luas wilayah 7.793,93 km². Tercatat jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis 498.335 jiwa dengan sifatnya yang heterogen, mayoritas penduduknya adalah penganut agama Islam. Disamping suku Melayu yang merupakan mayoritas penduduk, juga terdapat suku-suku lainnya seperti : suku Minang, suku Jawa yang mayoritas tinggal di Desa Pedekik, Wonosari , suku Bugis, suku Batak, etnis Tionghoa dan sebagainya. Bengkalis sebagai ibu kota kabupaten dikenal juga dengan julukan Kota Terubuk, karena daerah ini adalah penghasil *telur ikan Terubuk* yang sangat disukai masyarakat karena rasanya yang amat lezat dan tentu saja menyebabkan harga *telur ikan Terubuk* menjadi amat mahal. Kota lainnya adalah Duri sebagai daerah penghasil minyak.

B. Gambaran Umum Kecamatan Mandau

Secara geografis kecamatan Mandau yang ibukotanya Duri merupakan salah satu kecaatan yag termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis yang berada di Pulau Sumatera dengan jumlah penduduk sebanyak 250,529 Jiwa. Kecamatan Mandau pada awalnya berada di Muara Kelantan yang saat ini berada di wilayah kabupaten Siak yaitu Kecamatan Sungai Mandau. Pada

tahun 1960 ibu kota kecamatan Mandau pindah dengan kantor pertamanya di Simpang Pokok Jengkol. Pada tahun 1977 Kantor Camat Mandau pindah ke Jalan Sudirman Nomor 56 Duri sampai saat ini. Luas wilayah kecamatan Mandau saat ini adalah 912,47 Km² yang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bathin Solapan
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bathin Solapan
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pinggir
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bathin Solapan

Sedangkan letak wilayahnya berada pada 0°56'12"Lintang Utara sampai dengan 1°28'17"Lintang Utara dan 100°56'10" Bujur Timur - 101°43'26" Bujur Timur. Berikut tabel luas wilayah kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis:

Tabel IV.1 Luas Wilayah Kecamatan Mandau menurut Desa/Kelurahan

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	Presentase (%)
1	Air Jamban	25	2,74
2	Babussalam	8	0,88
3	Batang Serosa	6	0,66
4	Balik Alam	6	0,66
5	Duri Barat	14	1,53
6	Duri Timur	6	0,66
7	Gajah Sakti	20	2,19
8	Talang mandi	20	2,19
9	Pematang Pudu	25	2,74
10	Balai Makam	45	4,93
11	Harapan Baru	14	1,53
12	Petani	80	8,77
13	Sebangar	66,47	7,28
14	Bumbang	104	11,40
No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	Presentase (%)
15	Tambusai Batang Dui	10	1,10
16	Kesumbo Ampai	100	10,96

17	Simpang Padang	25,47	2,79
18	Pematang Obo	20	2,19
19	Air Kulim	60	6,58
20	Buluh Manis	67	7,34
21	Bathin Betuah	11	1,21
22	Boncah Mahang	83,53	9,15
23	Pamesi	76	8,33
24	Bathin Sobanga	20	2,19
Jumlah		912,47	100

Sumber: bappeda.bengkaliskab.go.id, 2019

Berdasarkan luas wilayah 912,47 dan jumlah penduduk sebesar 250,529 jiwa maka akan menghasilkan kepadatan penduduk sebesar 263 yang artinya dalam setiap 1 km² dihuni sekitar 263 orang.

Jumlah penduduk Kecamatan Mandau sebesar 250,529 jiwa yang terdiri dari 126,966 jiwa laki-laki dan 123.563 jiwa perempuan. Kecamatan mandau memiliki jumlah keluarga sebanyak 59.583 kepala keluarga. Dengan rata-rata jumlah keluarga dalam keluarga adalah empat orang. Jumlah tersebut hampir merata di semua desa/kelurahan. Kecamatan Mandau terdiri dari 902 Rukun tetangga (RT) dan 203 Rukun Warga (RW). Adapun Desa/Kelurahan yang memiliki jumlah RT yang terbanyak adalah Kelurahan Air Jamban sebanyak 122 RT dan Kelurahan Pematang Pudu sebanyak 83 RT.

Tabel IV.2 Kecamatan Menurut Desa/Kelurahan

No	Desa/Kelurahan	RT/ RW	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah KK
1	Air Jamban	122/23	22.544	22325	44.869	11.172
2	Babussalam	55/8	8.118	7.221	15.839	3.813
3	Batang Serosa	17/5	1.866	1.715	3.581	831
4	Balik Alam	35/10	5.398	4.962	10.360	2.592
5	Duri Barat	59/12	8.466	8.445	16.911	4.124
6	Duri Timur	28/6	4.612	4.106	8.718	2.161
7	Gajah Sakti	51/11	7.221	6.790	14.011	3.442
8	Talang mandi	68/15	10.511	10.170	20.681	4.754
9	Pematang Pudu	83/17	11.721	11.343	23.064	5374
10	Balai Makam	42/9	4.819	4.976	9.795	2017
11	Harapan Baru	20/5	1.974	2.131	4.105	1011
12	Petani	45/12	3.506	3.045	6.551	1.772
13	Sebangar	26/9	4.235	3.878	8.113	1.979
14	Bumbung	19/5	2.419	1.418	4.837	10.94
15	Tambusai Batang Dui	25/6	6.501	6.003	11.291	2.411
16	Kesumbo Ampai	16/5	1.734	1.751	3.485	862
17	Simpang Padang	34/6	7.052	6.590	12.013	2436
18	Pematang Obo	23/8	1.657	1.518	3.175	682
19	Air Kulim	28/6	2.553	2.513	5.066	1368
20	Buluh Manis	27/7	2.409	2.425	4.837	1193
21	Bathin Betuah	18/4	1.974	2.131	4.105	1021
22	Boncah Mahang	28/5	6.017	3.998	8.310	2013
23	Pamesi	17/5	1.740	2.325	4.065	813
24	Bathin Sobanga	15/4	1.392	1.358	2.750	648
Jumlah		902/ 203	126.96 6	123.563	250.529	59.583

Sumber: *bappeda.bengkalis.kab.go.id*, 2019

Secara keseluruhan Kecamatan Mandau terdiri dari 24 desa/ kelurahan yang status hukumnya sudah menjadi desa/ kelurahan defenitif yang dimana jika dilihat dari status pemerintahannya terdiri dari 9 kelurahan yang dipimpin oleh lurah dan 15 desa yang dipimpin oleh kepala desa. Adapun yang bersatus kelurahan adalah : Talang Mandi,Gajah Sakti, Batang Serosa, Balik Alam, Duri

Barat, Duri Timur, Babussalam, Air Jamban Dan Pematang Pudu. Sedangkan 15 yang berstatus desa yaitu: Harapan Baru, Sebangar, Balai Makam, Petani, Bumbang, Kasumbo Ampai, Bathin Betuah, Boncah Mahang, Tambusai Batang Dui, Simpang Padang, Pematang Obo, Air Kulim, Buluh Manis Pamesi Dan Bathin Sobanga.

Partisipasi perempuan dalam kepemimpinan disuatu desa/kelurahan di Kecamatan Mandau sangat tinggi, terlihat dari jumlah perangkat desa perempuan berjumlah sebanyak 88 orang, dari total keseluruhan jumlah perangkat desa 186 orang, sedangkan 98 orang perangkat desa laki-laki.

Pada awal tahun 2017 tepatnya bulan Maret Kecamatan Mandau mengalami pemekaran wilayah administratif dimana dipecah menjadi 1 Kecamatan baru yaitu Kecamatan Batin Solapan. Dengan terpecahnya kecamatan mandau maka beberapa Desa/Kelurahan yang mulanya berada dalam lingkup administrasi Kecamatan Mandau juga terbagi kedalam 2 kecamatan yakni berada pada lingkup administratif kecamatan Mandau dan Kecamatan Batin Solapan. Adapun desa atau kelurahan yang masuk wilayah administratif kecamatan Mandau antara lain: Kelurahan Air Jamban, Babussalam, Balik Alam, Batang Serosa, Duri Barat, Duri Timur, Gajah Sakti, Pematang Pudu, Talang Mandi, Desa Bathin Betuah, Dan Harapan Baru. Sedangkan kelurahan/ desa yang masuk kedalam kecamatan Bathin Solapan antara lain: Desa Air Kulim, Balai Makan, Bathin Sobanga, Boncah Mahang, Buluh Manis, Bumbang, Kesumbo Ampai, Pamesi, Pematang Obo, Petani, Sebangar, Simpang Padang dan Tambusai

Batang Dui. Kendati demikian, sampai saat ini segala urusan administratif masyarakat kelurahan atau desa yang berada di lingkup kecamatan Batin Solapan masih berada dalam lingkup pemerintahan Kecamatan Mandau. Hal ini disebabkan segala sarana dan prasarana pendukung kecamatan Batin Solapan belum terpenuhi dan masih dalam proses perumusan dan penentuan letak wilayah kecamatan.

Pendidikan merupakan faktor terpenting dalam menciptakan manusia yang berkualitas dan berintegritas terutama di dalam era kehidupan saat ini. Sehubungan dengan itu, tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat akan mendukung keberhasilan dan kemajuan pembangunan di suatu daerah. Karena pada dasarnya kemajuan suatu daerah salah satunya harus di dukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas.

Jumlah sarana pendidikan di wilayah kecamatan Mandau relatif banyak dan cukup merata di seluruh desa/kelurahan. Sarana pendidikan berjumlah 225 unit, dengan perincian 67 unit Taman Kanak-Kanak, 103 unit Sekolah Dasar, 29 unit Sekolah Menengah Pertama, 17 unit Sekolah Menengah Atas, 7 unit Sekolah Menengah Kejuruan dan 2 Perguruan Tinggi.

Jika melihat perspektif sosial budaya masyarakat di kecamatan Mandau terdapat sosial budaya yang beragam. Mayoritas masyarakat di Kecamatan Mandau adalah Islam. Kemudian di domisili oleh masyarakat berkeyakinan Kristen, Kong Hu Cu dan Budha. Walaupun sebagai agama mayoritas, masyarakat

muslim memiliki toleransi dan tenggang rasa yang baik terhadap sesama pemeluk agama.

Selain memiliki keberagaman beragama yang beragam kecamatan Mandau memiliki budaya yang beragam yang terdiri dari berbagai suku seperti Suku Sakai, Suku Melayu, Suku Minang, Suku Batak, Suku Jawa, Suku Banjar dan berbagai suku lainnya.

Apabila melihat perspektif perekonomian di kecamatan Mandau sektor industri dan pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat di Kecamatan Mandau dimana terdapat tiga industri besar dan satu industri besar yang beroperasi di wilayah kecamatan mandau. Sedangkan untuk industri kecil terdapat 62 unit dan industri mikro sebanyak 863 unit sedangkan sektor pertanian diisi dari sektor perkebunan karet dan perkebunan kelapa sawit. Selain sektor industri dan pertanian, perdagangan dan budidaya perikanan di kolam juga merupakan salah satu penggerak perekonomian di Kecamatan Mandau. Sebagai wilayah perlintasan antar Provinsi dan antar Kabupaten Kecamatan Mandau memiliki sarana perdagangan dan akomodasi dengan jumlah relatif banyak. Disamping itu peranan koperasi sebagai dasar perekonomian di Kecamatan Mandau juga cukup marak tercatat sebanyak 18 unit KUD dan 79 unit koperasi non KUD tersebar diseluruh desa/kelurahan.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Tahap awal dari uraian pembahasan ini penulis merasa perlu untuk menjelaskan identitas dari pada responden. Oleh karena hal tersebut dapat mempengaruhi objektivitas dan validitas berbagai informasi penelitian yang diberikan para responden. Adapun identitas responden yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

A.1. Umur Responden

Umur merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada seseorang dalam melaksanakan semua tugas-tugas yang diberikan, selain itu umur juga dapat berpengaruh pada produktivitas kerja. Semakin lanjut usia seseorang maka akan mempengaruhi produktivitas kerja, tingkat ketelitian dalam bekerja, konsentrasi dan ketahanan fisik

dalam bekerja, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor kesehatan, daya tahan dan lain-lain. Adapun tingkat umur responden pada Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yang menjadi responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.1 Jumlah Keseluruhan Responden Berdasarkan Umur

No.	Umur Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	< 20 tahun	9	29
2.	21-30 tahun	6	19
3.	31-40 tahun	19	42
4.	> 41 tahun	3	10
Jumlah		37	100

Sumber : Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel V.1 dapat diketahui bahwa mayoritas umur responden berada pada tingkat umur 31-40 tahun yakni sebanyak 19 orang atau 42% dan yang paling sedikit responden yang berusia < 41 tahun berjumlah 3 orang responden pada klasifikasi umur tersebut. Berdasarkan data tersebut diatas, mayoritas responden berada pada tingkat umur 31-40 tahun.

Umur merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada seseorang dalam melaksanakan semua tugas-tugas yang diberikan, selain itu umur juga dapat berpengaruh pada produktivitas kerja. Semakin lanjut usia seseorang maka akan mempengaruhi produktivitas kerja, tingkat ketelitian dalam bekerja, konsentrasi dan ketahanan fisik dalam bekerja, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor kesehatan, daya tahan dan lain-lain.

A.2. Jenis Kelamin

Berikut ini diuraikan mengenai responden pada Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis berdasarkan jenis kelamin.

Tabel V.2 Jumlah Keseluruhan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	26	65
2.	Perempuan	11	35
Jumlah		37	100

Sumber : Data Olahan, 2020

Berdasarkan Tabel V.2 dapat dilihat jumlah responden laki-laki sebanyak 26 orang atau 65%. Sedangkan responden perempuan sebanyak 11 atau 35%. Hal ini menunjukkan mayoritas responden adalah laki-laki.

Selain umur, jenis kelamin juga dapat berpengaruh dari pekerjaan yang diberikan. Pada umumnya pekerjaan laki-laki lebih berat dibandingkan dengan pekerjaan perempuan. Tetapi sebagian perusahaan atau instansi mempekerjakan seseorang bukan dilihat dari jenis kelamin tetapi lebih dari kemampuan dan pendidikan yang dimiliki pegawai tersebut.

B. Hasil Penelitian Tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

Pelaksanaan pembangunan desa atau kelurahan adalah merupakan bagian dari program pembangunan nasional yang dilaksanakan secara merata diseluruh pelosok tanah air. Berhasil tidaknya pembangunan pedesaan salah satunya ditentukan oleh ketetapan program pembangunan melalui administrasi pemerintah Desa. Dilain pihak keberhasilan pembangunan, termasuk partisipasi masyarakat dan adanya campur tangan pemerintah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan tugas ini antara lain

menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas, fungsinya dan wewenang. Pemerintahan Desa tidak terlepas dari peran melaksanakan administrasi pemerintah Desa itu sendiri, yang dilaksanakan untuk mengelola segenap kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemsyarakatan desa.

Pemerintahan desa harus dilaksanakan dengan baik sehingga mampu mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan didesa. Berdasarkan penjelasan diatas jelas bahwa desa memiliki kedudukan yang sangat strategi, oleh karena itu pelaksanaan dan penataan administrasi pemerintahan desa mutlak diperlukan sebagai upaya untuk mengembangkan potensi- potensi yang dimiliki desa tersebut yang pada gilirannya mampu meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat.

Disamping itu pemerintah desa dan kelurahan merupakan salah satu aspek yang dianggap penting dalam rangka peningkatan dan pengembangan pemerintah desa serta pelaksanaan pembangunan desa, hal ini karena pemerintah desa merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan desa beserta segenap aspek- aspek tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan yang dibebankan kepadanya.

Peningkatan dan pengembangan pemerintahan desa diharapkan dapat berperan untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi yang dibebanka kepada pemerintahan desa. Dalam struktur pemerintahan desa terdapat seperangkat aparat

yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi tersebut sebagai komponen penyelenggaraan tugas- tugas pemerintahan desa.

Untuk dapat memberikan hasil yang optimal di dalam pelaksanaan administrasi pemerintah desa maka diperlukan adanya kemampuan yang memadai baik dari segi kemampuan aparat pelaksanaan itu sendiri maupun dari segi fasilitas pendukung, termasuk kondisi pekerjaan yang dilaksanakan, sehingga akan dapat diarahkan kepada adanya kesatuan tindakan. Disamping itu kualitas aparat pemerintah desa yang relatif masih renda/ terbatas, maka kondisi masyarakat di desa juga mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas dari pemerintah desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Perencanaan pembangunan desa adalah sesuatu yang sangat penting. Karena dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Karena itu sudah menjadi kewajiban pemerintahan desa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Aspirasi masyarakat dapat tertampung dengan cara melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan tersebut. Karena pada dasarnya merekalah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Berikut ini dapat dilihat uraian mengenai hasil tanggapan responden

mengenai peran pemerintah desa dalam pembangunan desa di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis :

B.1. Penyampai Pesan Pembangunan

Pemerintah desa adalah lembaga yang keberadaannya sangat diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan desa. Pemerintah desa cukup berperan dalam pembangunan dengan program kerja yang telah ditetapkan. Program kerja dimaksudkan dapat membantu dan mengidentifikasi apa saja yang akan dilakukan dalam pembangunan desa, dan mengetahui apakah selama ini pemerintah desa cukup berperan dalam pembangunan desa atau hanya sekedar formalitas dalam struktur desa. Untuk dapat melihat hasil tanggapan responden mengenai indikator penyampai pesan pembangunan dalam peran pemerintah desa dalam pembangunan desa di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, maka dapat dilihat pada table berikut ini :

Table V.3. Distribusi penilaian responden dari unsur Anggota BPD, Kepala Dusun, Ketua RT dan Ketua RW terhadap indikator penyampai pesan pembangunan dalam peran pemerintah desa dalam pembangunan desa di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

No.	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1.	Kepala Desa dan perangkat desa sebagai penentu kerarah mana pembangunan yang dilakukan	6 (24%)	12 (48%)	7 (28%)	25 (100%)
2.	Pemerintah desa menentukan pembangunan dibidang apa yang harus di dahulukan	7 (28%)	14 (56%)	4 (16%)	25 (100%)
3.	Pemerintah desa sebagai solusi apabila terjadi ada permasalahan di tengah masyarakat	8 (32%)	13 (52%)	4 (16%)	25 (100%)

Jumlah	21	39	15	75
Rata-rata	7	13	5	25
Persentase	28%	52%	20%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020

Berdasarkan hasil tanggapan Anggota BPD, Kepala Dusun, Ketua RT dan Ketua RW mengenai indikator penyampai pesan pembangunan dalam peran pemerintah desa dalam pembangunan desa di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dalam kategori cukup berperan sebanyak 52%, hal ini menandakan bahwa tidak semua masyarakat yang memberikan pendapat mengenai pendapat pembangunan yang akan dilakukan karena sebagian masyarakat bertanggung jawab bahwa akan mempercayakan program pembangunan yang akan dilakukan ini kepada pihak pemerintah desa yang jelas lebih mengetahui apa kebutuhan masyarakatnya. Perencanaan pembangunan desa adalah sesuatu yang sangat penting. Karena dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Karena itu sudah menjadi kewajiban pemerintahan desa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Aspirasi masyarakat dapat tertampung dengan cara melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan tersebut. Karena pada dasarnya merekalah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Menurut hasil wawancara dengan Ahmad Sulaiman sebagai Ketua BPD mengatakan :

*“pemerintah desa telah membuat rencana pembangunan dengan baik, hanya saja pada pelaksanaannya masih belum terealisasi apa yang sudah di rencanakan oleh pemerintah desa ini karena adanya beberapa hambatan yang mana salah satunya kurangnya anggaran desa kita yang mana tidak disampaikan secara langsung kepada masyarakat. Beliau berharap kedepan pembangunan bisa lebih banyak lagi di desa ini dan semua permasalahan dapat selesai dengan cepat.
“(Hasil Wawancara Pada Tanggal 22 Juli 2020)*

Untuk mengetahui hasil tanggapan pegawai mengenai indikator penyampai pesan pembangunan dalam peran pemerintah desa dalam pembangunan desa di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, maka dapat dilihat pada table berikut ini :

Table V.4. Distribusi penilaian responden dari unsur Tokoh Masyarakat terhadap indikator penyampai pesan pembangunan dalam peran pemerintah desa dalam pembangunan desa di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

No.	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1.	Kepala Desa dan perangkat desa sebagai penentu kerarah mana pembangunan yang dilakukan	2 (40%)	8 (60%)	-	10 (100%)
2.	Pemerintah desa menentukan pembangunan dibidang apa yang harus di dahulukan	10 (100%)	-	-	10 (100%)
3.	Pemerintah desa sebagai solusi apabila terjadi ada permasalahan di tengah masyarakat	2 (40%)	8 (60%)	-	10 (100%)
Jumlah		14	16	-	30
Rata-rata		4	6	-	10
Persentase		40%	60%	-	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020

Dari tabel diatas diketahui bahwa hasil tanggapan tokoh masyarakat mengenai indicator penyampai pesan pembangunan dalam peran pemerintah desa dalam pembangunan desa di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, yaitu yang menyatakan berperan sebesar 40% dan yang menyatakan cukup

berperan sebesar 60%. Hal ini dinyatakan bahwa tokoh masyarakat sebagai wakil dari masyarakat tidak secara mendalam menggali aspirasi masyarakat sehingga tidak dapat menyampaikan secara langsung pesan dari masyarakat yang akan melaksanakan program pembangunan. Masyarakat dinilai enggan memberikan pendapat karena sama-sama merasakan bahwa adanya keterbukaan dan data infrasktruktur yang telah ditetapkan dan membutuhkan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat bersama.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Rudi Zulhenis yang merupakan Kepala Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis mengatakan :

“pelaksanaan pembangunan di ini berfokus pada pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana pembangunan sosial pedesaan seperti pembangunan jalan dan pembangunan pembuangan air dalam tanah. Pembangunan yang telah dilaksanakan adalah pembangunan yang berfokus pada pembangunan infrastruktur vital yang dapat membantu masyarakat untuk melaksanakan setiap kegiatan pemenuhan kehidupan sehari-hari agar terhindar dari permasalahan untuk kepentingan bersama dan akomodasi jalan dapat segera lancar tanpa hambatan jalan yang rusak. (Hasil Wawancara Pada Tanggal 20 Juli 2020)

Berdasarkan hasil observasi penulis kelapangan, penyusunan program yang telah dilakukan antara lain diperlaksanaan dan pengerasan jalan, jalan yang semula berlubang dan tidak rata diperlaksanai dan dikeraskan lagi agar msasyarakat mudah untuk dilewati masyarakat pengguna jalan. Sementara program yang akan dilaksanakan yaitu bantuan pembangunan rumah bagi masyarakat dari Pemerintah bagi masyarakat yang kurang mampu khususnya serta penyaluran modal usaha masyarakat melalui program perekonomian desa.

Banyaknya hasil tanggapan responden dan hasil wawancara maka dapat disimpulkan menyatakan kurang terlaksana. Sebagian masyarakat tersebut bertanggung bahwa program pemberdayaan yang akan dilaksanakan di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis kurang dimengerti oleh masyarakat

karena tidak semua masyarakat yang mendapat pembinaan teknis yang akan dilakukan. Tidak menyeluruhnya pelaksanaan teknis yang akan dilakukan ini membuat informasi yang didapat masyarakat tidak sama sehingga dapat menyebabkan perdebatan antar masyarakat satu dengan yang lainnya.

B.2. Pengaruh Masyarakat Untuk Berpartisipasi

Untuk menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya terhadap pembangunan, diperlukan adanya tenaga/unsur penggerak yang mampu menggerakkan dan mengarahkan kemampuan masyarakat untuk dapat mewujudkan cita-cita pembangunan dalam hubungan ini, maka Kepala desa memegang peranan yang menentukan. Sebagai pimpinan tertinggi dan penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, ia harus mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya yang saling kait-mengkait termasuk tugas pembangunan yang multi dimensional.

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa sangat di dukung oleh masyarakat, dalam artian keterlibatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Tanpa partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak akan berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Untuk dapat melihat hasil tanggapan responden mengenai indikator pengaruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam peran pemerintah desa dalam pembangunan desa di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, maka dapat dilihat pada table berikut ini :

Table V.5. Distribusi penilaian responden dari unsur Anggota BPD, Kepala Dusun, Ketua RT dan Ketua RW terhadap indikator pengaruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam peran pemerintah desa dalam pembangunan desa di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

No.	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1.	Pemerintah desa pemimpin atas program pembangunan yang dilakukan	7 (28%)	15 (60%)	3 (12%)	25 (100%)
2.	Pemerintah desa merupakan wakil dari seluruh masyarakat	6 (24%)	15 (60%)	4 (16%)	25 (100%)
3.	Pemerintah desa mneggerakkan masyarakat untuk bergotong royong	8 (32%)	12 (48%)	5 (20%)	25 (100%)
Jumlah		21	42	12	75
Rata-rata		7	14	4	25
Persentase		28%	56%	16%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020

Berdasarkan hasil tanggapan Anggota BPD, Kepala Dusun, Ketua RT dan Ketua RW mengenai indikator pengaruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam peran pemerintah desa dalam pembangunan desa di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dalam kategori cukup berperan sebanyak 56%, hal ini menandakan bahwa masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti program pemerintah desa karena alasan berbagai macam kesibukan masing-masing masyarakat tersebut. Partisipasi diartikan sebagai suatu kondisi dimana semua komponen masyarakat mempunyai peluang yang sama dalam kaitannya dengan akses, kontrol dan suara. Partisipasi merupakan hak dan kewajiban masyarakat yang sebenarnya sudah banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan kita.

Dalam melakukan program proyek kerja masyarakat selain dilakukan oleh pihak terkait pada lembaga masyarakat juga diikuti oleh masyarakat yang harus ikut turun tangan langsung. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat membantu program kerja masyarakat yang dilakukan dapat selesai dengan tepat waktu dan sesuai dengan penganggaran yang telah ditetapkan.

Dari wawancara dengan Kepala Desa Bapak Rudi Zulhenis yang merupakan Kepala Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis mengatakan :

kami sebagai tim yang mengatur dan menetapkan program proyek kerja masyarakat maka dalam pelaksanaannya penegrjaan program tersebut harus sesuai dengan penetapan program yang telah ditetapkan. Dalam hal penyimpangan yang terjadi maka tim kami harus mencari jalan keluar agar program kerja masyarakat ini harus tetap berjalan dengan tepat waktu. dalam pembangunan sarana dan prasarana desa ini sudah tersusun dan terprogram. Oleh karena itu dalam menjalankan program ini dilakukan seterlaksana mungkin agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang akan merugikan dan menghambat bagi kelangsungan pembangunan sarana dan prasarana ini. Oleh karena itu partisipasi masyarakat juga dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan ini. (Hasil Wawancara Pada Tanggal 22 Juli 2020)

Untuk mengetahui hasil tanggapan tokoh masyarakat mengenai indikator pengaruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam peran pemerintah desa dalam pembangunan desa di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, maka dapat dilihat pada table berikut ini :

Table V.6. Distribusi penilaian responden dari unsur tokoh masyarakat terhadap indikator pengaruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam peran pemerintah desa dalam pembangunan desa di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

No.	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1.	Pemerintah desa pemimpin atas program pembangunan yang dilakukan	8 (80%)	2 (20%)	-	10 (100%)
2.	Pemerintah desa merupakan wakil dari seluruh masyarakat	4 (40%)	6 (60%)	-	10 (100%)
3.	Pemerintah desa mneggerakkan masyarakat untuk bergotong royong	2 (20%)	8 (80%)	-	10 (100%)
Jumlah		14	16	-	30
Rata-rata		4	6	-	10
Persentase		40%	60%	-	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020

Dari tabel diatas diketahui bahwa hasil tanggapan tokoh masyarakat mengenai indicator pengaruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam peran pemerintah desa dalam pembangunan desa di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, yaitu yang menyatakan berperan sebesar 40% dan yang menyatakan cukup berperan sebesar 60%. Hal ini dinyatakan bahwa pengikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan merupakan salah satu cara yang efektif untuk menampung dan mengakomodasi berbagai kebutuhan yang beragam. Dengan kata lain, masyarakat yang mengetahui kebutuhan dalam hal pembangunan yang ada di Desanya berdasarkan permasalahan yang dihadapi serta juga potensi yang dimiliki, akibatnya berbagai masalah timbul dihadapan masyarakat antara lain pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga hasilnya tidak dapat mengangkat taraf hidup

masyarakat menjadi lebih baik. Dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat pada proses pembangunan dapat membawa keuntungan substantif, dimana pelaksanaan pembangunan akan lebih efektif dan efisien, disamping akan memberi sebuah rasa kepuasan dan dukungan masyarakat yang kuat terhadap program-program pemerintah desa.

Menurut hasil wawancara dengan Ahmad Sulaiman sebagai Ketua BPD mengatakan :

Dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan desa kurang dilakukan secara terlaksana oleh masyarakat, karena masyarakat sadar betul tidak dapat terus berpartisipasi dalam pembangunan yang sedang dilakukan. Masyarakat hanya dapat bergotong royong pada hari libur tertentu dan memantau secara jauh dari informasi yang diberikan masyarakat lainnya. Pengawasan pembangunan yang dilakukan juga tidak dapat dilakukan dengan terlaksana dengan alasan karena jarang mengikuti gotong royong dalam pembangunan maka masyarakat kurang tahu secara pasti apa perkembangan dari pembangunan tersebut. “(Hasil Wawancara Pada Tanggal 20 Juli 2020)

Berdasarkan hasil observasi peneliti kelapangan bahwa dapat dilihat pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat yang bergotong royong dan diawasi oleh masyarakat tersebut juga. Kepala desa sebagai penggerak hanya memantau pembangunan tidak rutin karena juga memiliki kesibukan sendiri. Penyimpangan yang ditemui dari pelaksanaan pembanguna tersebut hanya dilihat dari tidak adanya pengawasan dari tenaga ahli yang mengetahui secara jelas mengenai pembangunan yang dilakukan sehingga pembangunan bias saja siap dengan tidak optimal dan dapat terjadi kerusakan lagi pada pemabangunan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi kelapangan tersebut maka dapat diketahui melaksanakan dan mengendalikan pembangunan pada Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis kurang terlaksana dilakukan, dengan

alsaan pembangunan yang dilakukan tidak diawasi dengan terlaksana oleh kepala desa dan tenaga ahli sehingga penyimpangan-penyimpangan dalam pembangunan dapat saja terjadi.

B.3. Penyalur Aspirasi Masyarakat

Penyalur aspirasi masyarakat yaitu kepala desa yang menerima aspirasi masyarakat kemudian menyalurkan aspirasi tersebut untuk dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk dapat melihat hasil tanggapan responden mengenai indikator penyalur aspirasi masyarakat dalam peran pemerintah desa dalam pembangunan desa di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, maka dapat dilihat pada table berikut ini :

Table V.8. Distribusi penilaian responden dari unsur Anggota BPD, Kepala Dusun, Ketua RT dan Ketua RW terhadap indikator penyalur aspirasi masyarakat dalam peran pemerintah desa dalam pembangunan desa di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

No.	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1.	Pemerintah desa sebagai wadah aspirasi masyarakat	8 (32%)	14 (56%)	3 (12%)	25 (100%)
2.	Pemerintah desa menjalin komunikasi yang baik	7 (28%)	10 (40%)	8 (32%)	25 (100%)
3.	Pemberi informasi	6 (24%)	15 (60%)	4 (16%)	25 (100%)
Jumlah		21	39	15	75
Rata-rata		7	13	5	25
Persentase		28%	52%	20%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020

Berdasarkan hasil tanggapan Anggota BPD, Kepala Dusun, Ketua RT dan Ketua RW mengenai indikator penyalur aspirasi masyarakat dalam peran pemerintah desa dalam pembangunan desa di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dalam kategori cukup berperan sebanyak 52%, hal ini menandakan bahwa dalam menetapkan program pembangunan desa yang akan dilakukan maka tidak semua masyarakat yang mengeluarkan aspirasinya, yang mana aspirasi masyarakat ini dinilai penting dan sangat berdampak pada pengembangan desa ini sendiri. Dengan aspirasi masyarakat juga dapat terlihat bahwa keinginan masyarakat terkait program pembangunan apa yang diinginkan oleh masyarakat dan akan menjadi pertimbangan bagi pemerintah desa untuk melakukannya.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Rudi Zulhenis yang merupakan Kepala Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis mengatakan :

Kepala desa mempunyai tugas lain yaitu melaksanakan dan menyelenggarakan pembangunan di Desa karna kemajuan pembangunan Desa akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat didalamnya. Oleh karna itulah seorang Kepala desa harus memanfaatkan waktu dengan tepatnya sebagai Kepala desa guna peningkatan pembangunan Desa. Selain itu kepala desa juga mempunyai wewenang dalam menyalurkan semua aspirasi masyarakat yang sudah diterima saat melakukan musyawarah maupun rapat terbuka lainnya sehingga masyarakat akan lebih merasa dihargai karena pendapatnya diterima dan dilaksanakan. (Hasil Wawancara Pada Tanggal 22 Juli 2020)

Untuk mengetahui hasil tanggapan tokoh masyarakat mengenai indikator penyalur aspirasi masyarakat dalam peran pemerintah desa dalam pembangunan desa di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, maka dapat dilihat pada table berikut ini :

Table V.9. Distribusi penilaian responden dari unsur tokoh masyarakat terhadap indikator penyalur aspirasi masyarakat dalam peran pemerintah desa

dalam pembangunan desa di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

No.	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1.	Pemerintah desa sebagai wadah aspirasi masyarakat	4 (40%)	6 (60%)	-	10 (100%)
2.	Pemerintah desa menjalin komunikasi yang baik	8 (80%)	2 (20%)	-	10 (100%)
3.	Pemberi informasi	4 (40%)	6 (60%)	-	10 (100%)
Jumlah		16	14	-	30
Rata-rata		6	4	-	10
Persentase		60%	40%	-	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020

Dari tabel diatas diketahui bahwa hasil tanggapan tokoh masyarakat mengenai indicator penyalur aspirasi masyarakat dalam peran pemerintah desa dalam pembangunan desa di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, yaitu yang menyatakan berperan sebesar 60% dan yang menyatakan cukup berperan sebesar 40%. Hal ini dinyatakan bahwa tidak semua masyarakat yang mai ikut mengeluarkan aspirasi dalam musyawarah yang telah dilakukan karena adanya berbagai alasan antara lain karena kesibukan dan karena pendapat masyarakat tersebut aspirasi itu dapat diwakilkan oleh tokoh masyarakat ataupun pihak pemerintah desa lainnya yang juga mengetahui pembangunan apa yang lebih penting dilaksanakan di desa ini.

Menurut hasil wawancara dengan Ahmad Sulaiman sebagai Ketua BPD mengatakan :

Banyak Desa yang pembangunannya terkendala yang diakibatkan Kepala desa tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan tepat dan semaksimal mungkin, salah satunya yaitu disaat pasca MusBangDes yang begitu banyak dan padat sedangkan waktu yang terbatas untuk menyelesaikan outputnya berupa rencana pembangunan yang terdiri dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), RPTD (Rencana Pembangunan Tahunan Desa) dan DURP (Daftar Usulan Rencana Pembangunan) oleh karna itu Kepala desa dituntut harus bisa menggunakan dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin. (Hasil Wawancara Pada Tanggal 22 Juli 2020)

Berdasarkan hasil observasi peneliti kelapangan bahwa dapat dilihat dalam melakukan program proyek kerja masyarakat selain dilakukan oleh pihak terkait pada lembaga masyarakat juga diikuti oleh masyarakat yang harus ikut turun tangan langsung. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat membantu program kerja masyarakat yang dilakukan dapat selesai dengan tepat waktu dan sesuai dengan penganggaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi kelapangan tersebut maka dapat diketahui pengikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan merupakan salah satu cara yang efektif untuk menampung dan mengakomodasi berbagai kebutuhan yang beragam. Dengan kata lain, masyarakat yang mengetahui kebutuhan dalam hal pembangunan yang ada di Desanya berdasarkan permasalahan yang dihadapi serta juga potensi yang dimiliki, akibatnya berbagai masalah timbul dihadapan masyarakat antara lain pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga hasilnya tidak dapat mengangkat taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik. Dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat pada proses pembangunan dapat membawa keuntungan substantif, dimana pelaksanaan pembangunan akan lebih efektif dan efisien, disamping akan memberi sebuah rasa kepuasan dan dukungan masyarakat yang kuat terhadap program-program pemerintah desa.

Berikut ini dapat dilihat hasil rekapitulasi tanggapan responden Anggota BPD, Kepala Dusun, Ketua RT dan Ketua RW mengenai Peran pemerintah desa dalam pembangunan desa di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, yaitu :

Table V.10. Rekapitulasi Hasil Tanggapan Anggota BPD, Kepala Dusun, Ketua RT dan Ketua RW Mengenai Peran pemerintah desa dalam pembangunan desa di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

No.	Indikator Variabel	Kategori Jawaban			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1.	Penyampai pesan pembangunan	7 (28%)	13 (52%)	5 (20%)	25 (100%)
2.	Pengaruh masyarakat untuk berpartisipasi	7 (28%)	14 (56%)	4 (16%)	25 (100%)
3.	Penyalur aspirasi masyarakat	7 (28%)	13 (52%)	5 (20%)	25 (100%)
Jumlah		21	40	14	75
Rata-rata		7	14	4	25
Persentase		28%	56%	16%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020

Berdasarkan tabel hasil rekapitulasi tanggapan Anggota BPD, Kepala Dusun, Ketua RT dan Ketua RW mengenai Peran pemerintah desa dalam pembangunan desa di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, secara keseluruhan responden banyak menyatakan cukup berperan yaitu sebesar 56%, hal ini menandakan bahwa dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di desa belum sepenuhnya berjalan secara optimal, masih ada ditemui beberapa permasalahan yang mana salah satunya penyelesaian pembangunan jalan tidak selesai dengan tepat waktu.

Dari hasil observasi diketahui dalam menjalankan perannya pemerintah desa yang terdiri dari Anggota BPD, Kepala Dusun, Ketua RT dan Ketua RW belum sepenuhnya dapat menjalankan tugasnya dengan baik, hal ini dapat dilihat dari rendahnya

kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa yang mana dalam acara rapat atau musyawarah yang dilakukan tidak banyak masyarakat yang datang untuk memberikan aspirasinya terkait pembangunan apa yang akan dilakukan. Tentu saja hal ini berdampak pada pelaksanaan pembangunan desa yang tidak berjalan dengan baik dan tidak tepat waktu.

Berikut ini dapat dilihat hasil rekapitulasi tanggapan responden tokoh masyarakat mengenai Peran pemerintah desa dalam pembangunan desa di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, yaitu :

Table V.11. Rekapitulasi Hasil Tanggapan Tokoh Masyarakat Mengenai Peran pemerintah desa dalam pembangunan desa di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

No.	Indikator Variabel	Kategori Jawaban			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1.	Penyampai pesan pembangunan	4 (40%)	6 (60%)	-	10 (100%)
2.	Pengaruh masyarakat untuk berpartisipasi	4 (40%)	6 (60%)	-	10 (100%)
3.	Penyalur aspirasi masyarakat	6 (60%)	4 (40%)	-	10 (100%)
Jumlah		14	16	0	30
Rata-rata		4	6	0	10
Persentase		40%	60%	0	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020

Berdasarkan tabel hasil rekapitulasi tanggapan tokoh masyarakat mengenai Peran pemerintah desa dalam pembangunan desa di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, secara keseluruhan responden banyak menyatakan cukup berperan yaitu sebesar 60%, hal ini menandakan bahwa tokoh masyarakat belum sepenuhnya dapat mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam merencanakan dan

melaksanakan proram pembangunan yang akan dilakukan, sehingga pengerjaan pembangunan ini tidak dapat berjalan secara optimal.

Dari hasil observasi diketahui bahwa tokoh masyarakat belum dapat berperan secara optimal dalam membantu pemerintah desa untuk menjalankan program pembangunan desa. Tokoh masyarakat belum dapat mengajak masyarakat secara sepenuhnya untuk ikut berpartisipasi dalam ikut melaksanakan program pembangunan desa tersebut. Sehingga tokoh masyarakat belum dapat menyampaikan secara keseluruhan mengenai aspirasi masyarakat tersebut.

C. Hambatan Dalam Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan dari berbagai uraian di atas mengenai pelaksanaan tugas Pemerintah desa dalam pembangunan Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dan tugasnya sebagai sebagai pembina, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat tidak terlepas dari berbagai hambatan ataupun tantangan. Hambatan itu meliputi komunikasi yang kurang dari Pemerintah desa kepada masyarakat, aparat Desa, dan pemerintahan diatasnya, rendahnya kualitas sumber daya, serta sikap dari Pemerintah desa itu sendiri. Dengan beberapa hambatan tersebut, jelas akan Mempengaruhi keberlangsungan pembangunan yang ada di Desa.

a. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu timbal balik atau bertukar pikiran antar satu orang atau lebih. Sebagai masyarakat tidak akan bias hidup sendiri dan kesemuanya membutuhkan bantuan orang lain dalam segala keberlangsungan hidup didunia ini. Komunikasi sangat penting juga bagi suatu pemerintahan dalam hal ini adalah pemerintahan Desa, disaat suatu Desa mengadakan suatu acara atau kegiatan yang membahas pembangunan desa, maka Pemerintah desa, perangkat Desa dan masyarakat harus kompak dan melakukan sebuah komunikasi agar tercipta sebuah kejelasan dan tidak terjadi salah paham dalam segala proses tersebut.

b. Sumber Daya

Pembangunan Desa merupakan bagian internal dari pembangunan nasional, merupakan usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Dalam pelaksanaannya pembangunan Desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.

Seperti yang telah dikatakan diatas mengenai pembangunan Desa salah satunya adalah peningkatan sumberdaya. Pada unsur pemerintahannya sumber daya merupakan hal yang vital harus ada pada seorang pemimpin Desa, dalam hal ini adalah Pemerintah desa. Sumberdaya yang harus ada pada seorang

pemerintah desa yaitu kemampuannya baik yang berasal dari pendidikan formal atau dari alam, yaitu dari pengalaman memimpin dari seorang Pemerintah desa.

c. Sikap

Keberhasilan seorang Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas tidak hanya ditentukan oleh salah satu aspek semata-mata, melainkan antara sifat, perilaku, dan kekuasaan-pengaruh saling menentukan sesuai dengan situasi yang mendukungnya. Kekuasaan-pengaruh mempunyai peranan sebagai daya dorong bagi seorang Pemerintah desa dalam mempengaruhi, menggerakkan, dan mengubah perilaku yang dipimpinnya dalam hal ini adalah masyarakat ke arah pencapaian tujuan pembangunan desa yang sesuai dengan tujuan nasional dan visi dan misi desa.

Pemerintah desa adalah orang yang mampu memberikan asumsi dan motivasi serta jalan yang pasti dan setidaknya benar kepada aparat Desa lainnya serta masyarakat yang dipimpinnya. Hal tersebut tidak juga mudah dilakukan oleh Pemerintah desa, sebuah sikap yang tetap dan nyata ditunjukkan oleh Pemerintah desa menjadikan hal itu bisa diwujudkan.

Hubungan antara sikap Pemerintah desa dengan masalah pembangunan Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis jelas adanya, diantaranya sikap-sikap tegas yang harus ditunjukkan oleh Pemerintah desa dalam memberikan instruksi dan perintah kepada orang-orang yang terlibat dalam sebuah pembangunan Desa.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diperoleh kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Dari indikator penyampai pesan pembangunan dalam peran pemerintah desa dalam pembangunan desa di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dalam kategori cukup berperan, hal ini menandakan bahwa tidak semua masyarakat yang memberikan pendapat mengenai pendapat pembangunan yang akan dilakukan karena sebagian masyarakat bertanggung bahwa akan mempercayakan program pembangunan yang akan dilakukan ini kepada pihak pemerintah desa yang jelas lebih mengetahui apa kebutuhan masyarakatnya. Perencanaan pembangunan desa adalah sesuatu yang sangat penting. Karena dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Karena itu sudah menjadi kewajiban pemerintahan desa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Aspirasi masyarakat dapat tertampung dengan cara melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan tersebut. Karena

pada dasarnya merekalah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

2. Dari indikator pengaruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam peran pemerintah desa dalam pembangunan desa di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dalam kategori cukup berperan, hal ini menandakan bahwa masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti program pemerintah desa karena alasan berbagai macam kesibukan masing-masing masyarakat tersebut. Partisipasi diartikan sebagai suatu kondisi dimana semua komponen masyarakat mempunyai peluang yang sama dalam kaitannya dengan akses, kontrol dan suara. Partisipasi merupakan hak dan kewajiban masyarakat yang sebenarnya sudah banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan kita.
3. Dari indikator penyalur aspirasi masyarakat dalam peran pemerintah desa dalam pembangunan desa di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dalam kategori cukup berperan, hal ini menandakan bahwa dalam menetapkan program pembangunan desa yang akan dilakukan maka tidak semua masyarakat yang mengeluarkan aspirasinya, yang mana aspirasi masyarakat ini dinilai penting dan sangat berdampak pada pengembangan desa ini sendiri. Dengan aspirasi masyarakat juga dapat terlihat bahwa keinginan masyarakat terkait program pembangunan apa yang diinginkan oleh masyarakat dan akan menjadi pertimbangan bagi pemerintah desa untuk melakukannya.

4. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis sudah dapat dikatakan cukup berperan, dikarenakan dalam pelaksanaan Tugas Kepala Desa ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan masih adanya beberapa pembangunan desa yang belum optimal dilakukan sehingga tidak dapat selesai dengan tepat waktu.
5. Ada beberapa faktor yang menghambat dalam Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yaitu yang pertama Komunikasi. Seorang Kepala Desa yang mempunyai peranan sentral dalam pemerintahan Desa dituntut mempunyai dan memiliki komunikasi yang baik terhadap masyarakatnya sehingga apapun kegiatan yang diselenggarakan Desa yang menyangkut pembangunan tidak terjadi kesalahpahaman, dan faktor yang selanjutnya yaitu faktor Sumberdaya, dalam prosesnya, pembangunan Desa tidak akan pernah luput dari potensi sumberdaya yang dimiliki Desa baik itu Sumberdaya Kepala Desa, masyarakat Desa, Aparat desa, dan Sumberdaya Alam yang dimiliki Desa. Faktor berikutnya yaitu Sikap yang mana sikap dari seorang pemimpin Desa menjadikan dirinya contoh bagi masyarakat Desa, sikap diatas meliputi ketegasan dan gaya kepemimpinan serta perilaku dari pemimpin.

B. Saran

Sebagai bahan masukan kepada pemerintah desa sehubungan dengan penyusunan skripsi ini penulis mencoba memberikan saran antara lain :

1. Diharapkan kepada Kepala Desa dapat meningkatkan tugas Kepala Desa dengan secara maksimal lagi. Dimana dalam hal ini tentunya diharapkan adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antara pihak-pihak atau instansi yang terkait dalam pelaksanaan tugas dalam pembangunan Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.
2. Kepala Desa harus lebih cermat dan cerdas dalam menentukan prioritas pembangunan dan pemamfaatan waktu dalam pembangunan Desa agar terciptanya pembangunan yang benar-benar member manfaat bagi masyarakat.
3. Kepala Desa sebagai pimpinan Pemerintahan Desa yang menjadi contoh bagi masyarakat hendaknya dan dituntut harus memiliki jiwa seorang pemimpin. Dalam hal ini Kepala Desa mestinya bersikap tegas dan bukan otoriter.
4. Kepala Desa dalam memberdayakan Aparat desa perlu dilakukan dalam hal ini yaitu meningikut sertakan kaur-kaur Pemerintahan Desa dalam suatu Pelatihan. Agar mereka benar dan dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

Abdul Halim. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta. Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Ahmad, Komarudin. 1991. *Dasar-dasar Manajemen Modal Kerja*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Arifin, Syamsui. 2012. *Leadership: Ilmu dan Sent Kepemimpinan*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.

Atik, dan Ratminto. 2005. *Manajemen Pelayanan, disertai dengan pengembangan model konseptual, penerapan citizen's charter dan standar pelayanan minimal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dwidjowijoto dan Wrihatnolo. 2007. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT.

Elex Media. Gronroos, C. 1990. *Service Management and Marketing: Managing the Moment of Truth in Service Competition*. Massachusetts: Lexington.

Harun, Rochajat dan Elvinaro Ardianto. 2011. *Komunikasi pembangunan dan perubahan sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ibrahim, Amin. 2009. *Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implementasinya*. Bandung: PT Refika Aditama.

Kuncoro, Mudjarad. 2004. *Otonomi & Pembangunan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga. Moloeng,

Lexy. 2006. *Metode Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya. Bandung. Nasdian, Fredian Tonny. 2014. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Neuman, W. Lawrence. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* PT. Indeks. Jakarta.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Rivai, Veithzal. 2004. *Kepemimpinan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Robbins, Stephen P & Coulter, Mary. 2009. *Management, 10th Edition*. Prentice Hall: Pearson Education. Alih bahasa: Sabran, Bob, Putera & Devri Bamadi. 2010. *Manajemen, Edisi Kesepuluh Jilid 1*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Santosa, Pandji. 2009. *Administrasi Puhlik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT Refika Aditama.

Siagian, P. Sondang. 2012, *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Siswanto. 2010. *Pengantar Manajemen*. - Cet.6. Jakarta: Bumi Aksara. Soekanto,

Soerjono. 1990. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Bandung: Armico.

- Subandi, 2011. *Ekonomi Pembangunan*, Cetakan Kesatu, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* Alfabeta Bandung.
- Syani, Abdul. 1994. *Sosiologi: Skematika Teori dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Terry, George R. dalam Afifudin. 2013. *Dasar-dasar Manajemen*, (Terje: G.ATicoalu), CV. Alfabeta, Bandung.
- Theresia, Aprillia, dkk. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akademis, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administreasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1982. *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: Penerbit Gunung Agung.
- Widjaja, A.W. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT. Raja Grafirfdo Persada.

Dokumentasi

UUD Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

UUD Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Badan
Permusyawaratan Desa

Jurnal

Fitri Ladyanti. 2016. *Peran pemerintah dan masyarakat dalam mengoptimalkan pengelolaan pembangunan desa di Kecamatan Buntumalangka Kabupaten Mamasa*. Jurnal Pemerintahan.

Laksana, Nuring Septyasa. 2013. *Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa dalam Progam Desa Siaga di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik: Volume 1, Nomor 1

Rosalina, Maya. 2013. *Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kuala Lapang dan Desa Taras Kecamatan Malinau Bar at Kabupaten Malinau*. E-Journal Pemerintahan Integratif: Volume 1, Nomor 1.

Sonny Walangitan. 2016. *Peranan Pemerintah dan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Suatu Studi di Desa Kanonang II Kecamatan Kawangkoan Barat)*. Jurnal Pemerintahan.

Vestikowati, Endah. 2012. *Model Kemitraan Pemerintah dengan Sektor Swasta dalam Pembangunan Daerah*. Cakrawala Galuh: No. 8 Vol. 1

Wiwin. 2014. *Peran pemerintah dan Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba*. Jurnal Pemerintahan.